



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2018

DENPASAR 2019

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan





pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 28 Maret 2019

WALIKOTA DENPASAR,



RAIDHARMAWIJAYA MANTRA





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Kota Denpasar	2
B.1. Kondisi Geografis	2
B.2. Kondisi Demografis	6
B.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	11
C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	13
C.1. Kedudukan	13
C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok.....	14
C.3. Struktur Organisasi.....	16
D. Aparatur Pemerintah	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018....	32
B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018.....	37
C. Akuntabilitas Keuangan	104
D. Analisa Efisiensi	108
BAB IV PENUTUP	111
LAMPIRAN	113





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan (Hektar) Tahun 2017	3
Tabel 1.2.	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2016 – 2017.....	5
Tabel 1.3	Kepadatan penduduk per Kecamatan.....	7
Tabel 1.4	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2016 dan 2017	7
Tabel 1.5	Trend Indikator Kependudukan Kota Denpasar	8
Tabel 1.6	Presentase penduduk menurut kelompok umur	9
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017.....	9
Tabel 1.8	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s/d 2017 Kota Denpasar	12
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	24
Tabel 2.2	Tujuan , Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018.....	29
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar 2018...	29
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018.....	33
Tabel 3.2	Capaian Kinerja.....	36
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	38
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	42
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3	44
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4	48
Tabel 3.7	Perbandingan TPT dan TPAK se-Bali Tahun 2017 dan 2018	49
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5	51





Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6	59
Tabel 3.10	Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar di Tahun 2018.....	60
Tabel 3.11	Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016-2018.	61
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7	64
Tabel 3.13	Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Kota Denpasar Tahun 2016-2018	65
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8	66
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9	69
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10	73
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11	80
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12	81
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13	83
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14	92
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15	96
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16	99
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Indeks LH Tahun 2018.....	103
Tabel 3.24	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Sebelum Dilakukan AuditBPKRI)	104
Tabel 3.25	Pagu dan Realisasi Anggran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2018.....	105
Tabel 3.26	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar.....	106
Tabel 3.27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	109





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	4
Gambar 1.2	Diagram Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017	11
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar, 2013-2017 (Persen)	12
Gambar 1.4	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s/d 2017 Kota Denpasar	13
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	17
Gambar 3.1	Grafik Capaian Kinerja	37
Gambar 3.2	Potret Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016-2018	47
Gambar 3.3	Kemiskinan Kab/Kota se-Bali Tahun 2018	47
Gambar 3.5	Walikota Denpasar diwakili Bapak Asisten III menerima Piagam Penghargaan Pengelolaan keuangan Daerah dari Kementrian Keuangan RI dengan Predikat WTP	75
Gambar 3.6	Sistem Logical Framework dan Cascading	78
Gambar 3.7	Walikota Denpasar menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Koperasi Berprestasi	83
Gambar 3.8	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar saat membuka pelatihan kewirausahaan	85
Gambar 3.9	Kepala Dinas Koperasi UMKM dengan Peserta Pameran di Stand Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dalam rangka Pameran Inacraft	87
Gambar 3.10	Fasilitasi dengan mengikutsertakan UMKM Kota Denpasar pada Pameran Inacraft di Jakarta Convention Center Jakarta	88
Gambar 3.11	Assisten III, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Ketua Dekopinda dan peserta diklat saat pembukaan Diklat Sertifikasi Kompetensi	89
Gambar 3.12	Pelaksanaan Monitoring Perkuatan permodalan bagi koperasi	90





Gambar 3.13	Kepala Dinas Koperasi saat melihat stand pameran Koperasi yang ikut serta dalam rangkaian Harkopnas Expo 2018 di Hall 8 ICE BSD City Tangerang Selatan- Banten	91
Gambar 3.14	Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar Tahun 2016-2018	92
Gambar 3.15	Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2014-2018.....	93
Gambar 3.16	Promosi Pariwisata Budaya Kota Denpasar di TMII Jakarta	95
Gambar 3.17	Antusiasme Siswa-siswa Sekolah dalam menabung sampah di bank sampah	100



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 16 Sasaran dan 29 Indikator Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target), dan 1 indikator sasaran nilainya belum keluar.
- Misi 2. terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 7 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran kategori baik (mencapai target), 3 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).
- Misi 3. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran kategori baik (mencapai target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target).





- Misi 4. terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran kategori baik (mencapai target) serta 2 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target) .
- Misi 5 terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 indikator sasaran kategori baik (belum mencapai target)

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 29 indikator sasaran, diketahui bahwa 13 indikator sasaran Baik Sekali (melampaui target), 7 indikator sasaran Baik (mencapai target), 8 indikator sasaran Baik (belum mencapai target), dan 1 indikator sasaran realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 102,20% atau bermakna Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 Sangat Baik.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur





Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LAKIP Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2018 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018 yaitu tahun Pertama RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

B. Kondisi Kota Denpasar

B.1. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km² (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km² (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan



luas wilayah 22,54 km² (17,64 persen). Selengkapnya disajikan dalam tabel 1.1

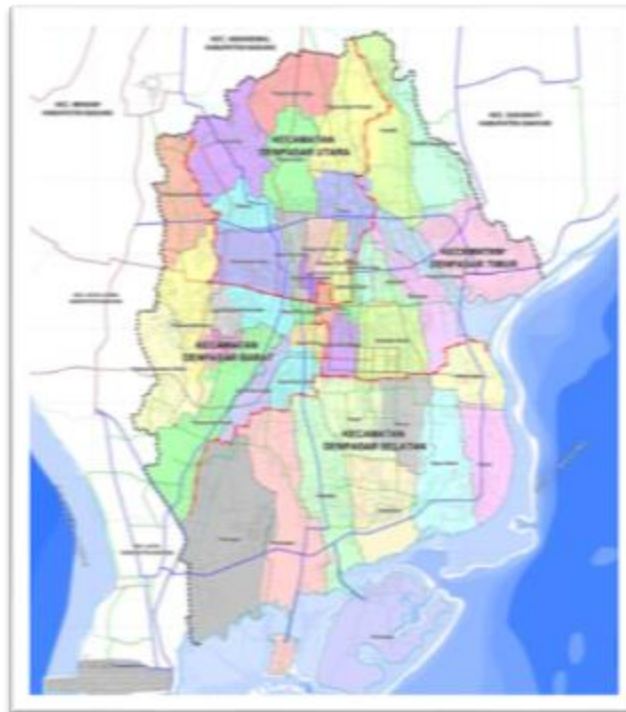
Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan
(Hektar) Tahun 2017

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara		3142	24.59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4.52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2.39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7.32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2.29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12.25
	1.6	Desa Ubung	103	3.28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13.69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3.47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20.50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17.06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13.24
2	Kecamatan Denpasar Barat		2406	18.83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17.12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18.37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7.61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7.81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2.49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2.45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7.73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2.58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1.45
	2.1	Kelurahan Padang Sambian	370	15.38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17.00
3	Kecamatan Denpasar Timur		2231	17.46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9.37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12.01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10.71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12.60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17.03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2.24



	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2.33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3.90
	3.9	Kelurahahn Dangin Puri	62	2.78
	3.1	Kelurahan Penatih	291	13.04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13.98
4		Kecamatan Denpasar Selatan	4999	39.12
	4.1	Desa Pemogan	971	19.42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14.98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14.78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9.62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7.78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7.18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5.08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7.72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8.04
	3.1	Desa Sanur Kaja	269	5.38
		Kota Denpasar	12778	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Gambar 1.1.
Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar



Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Lahan Pertanian di Kota Denpasar merupakan lahan sawah irigasi. Luas lahan pertanian selama 2 tahun (2016-2017) berkurang seluas 35 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2016-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2.
Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar)
Tahun 2016 – 2017

Penggunaan Lahan		2016	2017
1	Lahan Pertanian	2,954.00	2,919.00
	Lahan Sawah	2,444.00	2,444.00
	- Irigasi	2,444.00	2,444.00
	- tadah Hujan	0.00	0.00
	- Rawa Pasang Surut	0.00	0.00
	- Rawa Lebak	0.00	0.00



Penggunaan Lahan		2016	2017
	Lahan Pertanian Bukan sawah	510.00	510.00
	- tegalan	390.00	390.00
	- ladang	0.00	0.00
	- perkebunan	35.00	35.00
	- Hutan Rakyat	75.00	75.00
	- Padang Rumput	0.00	0.00
	- sementara tidak diusahakan	0.00	0.00
	- lainnya	10.00	10.00
	2 Lahan bukan Pertanian	9,824.00	9,859.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

B.2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2017 mencapai 914.300 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 466.700 jiwa (51,04%) dan jumlah penduduk perempuan 447.600 jiwa (48,96%). Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2018 menurut proyeksi BPS Kota Denpasar sebanyak 930,6 (ribu orang). Kepadatan penduduk Kota Denpasar sebesar 7.155 orang/Km² serta dengan Sex Ratio 104 yang berarti dari 100 orang jumlah perempuan terdapat sekitar 104 orang laki-laki.



Tingkat Kepadatan Penduduk Denpasar di tahun 2017, 10 kali lipat kepadatan penduduk rata-rata Provinsi Bali yaitu sebesar 753 (jiwa/Km²). Dari empat kecamatan di Kota Denpasar, kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat (10.993 jiwa per km²) kemudian Kecamatan Denpasar Timur (6.982 jiwa per km²), Kecamatan Denpasar Utara (6.409 jiwa per km²), dan Kecamatan Denpasar Selatan (5.855 jiwa per km²).

Tabel 1.3.
Kepadatan penduduk per kecamatan

Kecamatan	Rata-rata Penduduk Per Desa/ Kelurahan	Kepadatan Penduduk
Denpasar Selatan	29,267	5.855
Denpasar Timur	14,160	6.982
Denpasar Barat	24,045	10.993
Denpasar Utara	18,307	6.409
Kota Denpasar	21,263	7.155

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

Jumlah Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah Penduduk 292,670 jiwa. Penduduk dengan jumlah terendah terdapat di Kecamatan Denpasar Timur yaitu berjumlah 155,760 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 79.140 jiwa, perempuan 76.620 jiwa.

Tabel 1.4.
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis
Kelamin per Kecamatan Tahun 2016 dan 2017

Kecamatan	Tahun 2016		Jumlah 2016	Tahun 2017		Jumlah 2017
	Laki- Laki	Perem- puan		Laki- Laki	Perem- puan	
Denpasar Selatan	146.220	139.840	286.060	149.510	143.160	292.670
Denpasar Timur	78.040	75.440	153.480	79.140	76.620	155.760



Denpasar Barat	132.760	127.030	259.790	135.090	129.400	264.490
Denpasar Utara	101.280	96.690	197.970	102.960	98.420	201.380
Jumlah	458.300	439.000	897.300	466.700	447.600	914.300

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin rendahnya persentase dependency ratio menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dependency Ratio Penduduk Bali dan Kota Denpasar Tahun 2017 menunjukkan Tingkat ketergantungan penduduk Denpasar lebih rendah dibandingkan penduduk kab/kota lain di Bali sebesar 36,77 dibandingkan Provinsi Bali sebesar 44,71.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif, tahun 2013 mencapai 2,093% tahun 2014 turun menjadi 2,06% tahun 2015 turun menjadi 1,97% dan tahun 2016 turun lagi menjadi 1,90%.

Tabel 1.5.
Trend Indikator Kependudukan
Kota Denpasar

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	880,600	897,300	914,300
Pertumbuhan Penduduk	1.97	1.90	1.89
Kepadatan Pnduduk (jiwa/km2)	6,891	7,022	7,155
ratio jenis kelamin (%)	104	104	104

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018



Ditinjau menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) masih tergolong ideal yaitu mencapai 73,12% dengan rasio beban tanggungan sebesar 36,77%. Artinya, setiap 100 orang penduduk Kota Denpasar usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 37 orang penduduk yang tidak/belum produktif.

Tabel 1.6.
Presentase penduduk menurut
kelompok umur

Uraian	2015	2016	2017
0-14 thn	24.36	24.16	23.88
15-64 thn	72.73	72.86	73.12
>65 th	2.91	2.98	3.01
Rasio ketergantungan	37.49	37.24	36.77

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

Penduduk Kota Denpasar sebagian besar bermata pencaharian pada lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sejumlah 211.632 jiwa atau 42,17% dari Jumlah Penduduk yang bekerja di Kota Denpasar tahun 2017. Secara terperinci jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7.
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun
keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2017

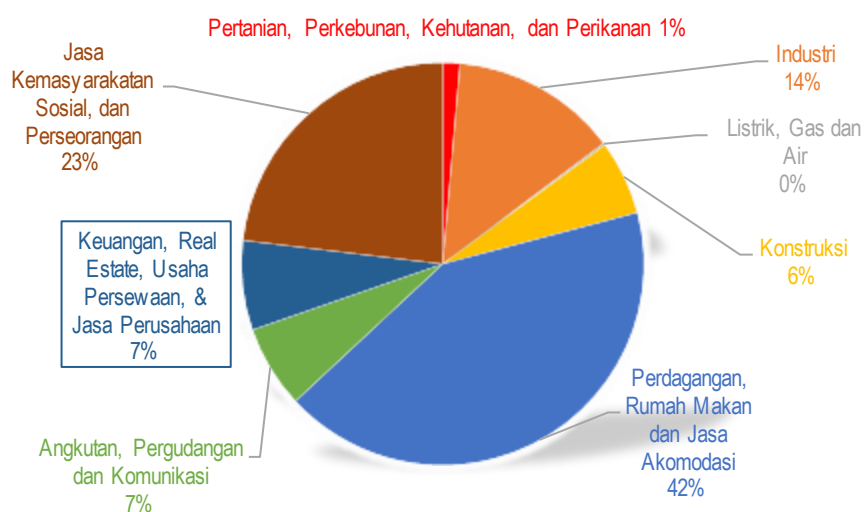
No	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Perkebunan,	5,719.00	1,141.00	6,860.00	1.37%





No	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
	Kehutanan, dan Perikanan				
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00%
3	Industri	32,291.00	34,903.00	67,194.00	13.39%
4	Listrik, Gas dan Air	452.00	378.00	830.00	0.17%
5	Konstruksi	28,145.00	1,818.00	29,963.00	5.97%
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	114,455.00	97,177.00	211,632.00	42.17%
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	28,170.00	5,121.00	33,291.00	6.63%
8	Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan	20,475.00	15,564.00	36,039.00	7.18%
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial, dan Perseorangan	56,430.00	59,670.00	116,100.00	23.13%
	Jumlah	286,137.00	215,772.00	501,909.00	100.00%

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018



Gambar 1.2.

Diagram Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017

B.3. Pertumbuhan Ekonomi

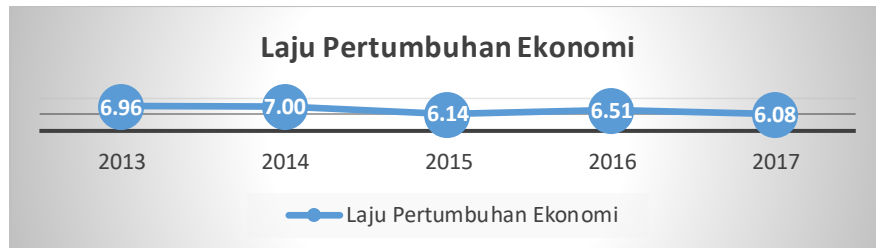
Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa disuatu daerah atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017, sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2016 sebesar 6,51 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali yang hanya sebesar 6,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,96 persen dan pada tahun 2014 mengalami percepatan menjadi 7,00 persen. Meski pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 6,14 persen, hingga pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Denpasar mengalami



percepatan kembali menjadi sebesar 6,51 persen . Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar kembali mengalami perlambatan menjadi sebesar 6,08 persen.



Gambar 1.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar,
2013-2017 (Persen)

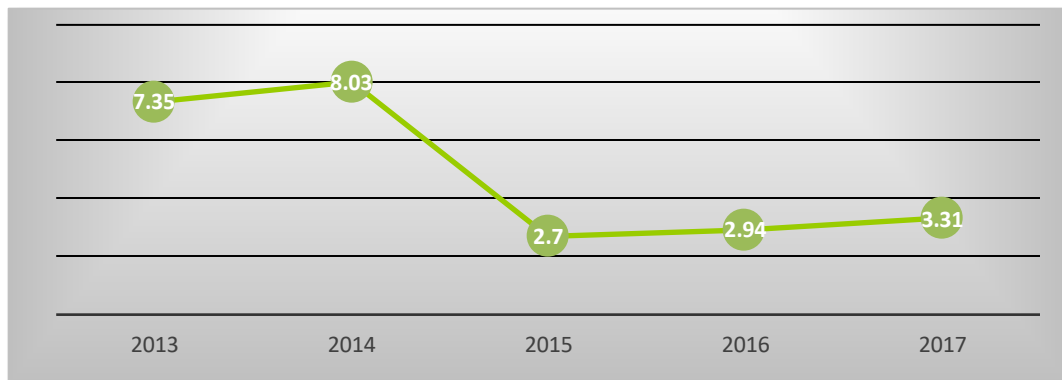
Inflasi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu). Atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dilihat dari penyebabnya inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (demand pull inflation) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (cost push inflation). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi, ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa tersebut. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (input) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut meningkat.

Tabel 1.8.
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s/d 2017 Kota
Denpasar

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	7,35	8,03	2,7	2,94	3,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2018





Gambar 1.4.

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s/d 2017 Kota Denpasar

Inflasi Kota Denpasar di tahun 2017 sebesar 3,31 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,94 persen sedikit mengalami kenaikan dikarenakan naiknya indeks pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sumber : BPS Kota Denpasar, 2017

C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

C.1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Denpasar dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Denpasar dari aspek politik ditandai dengan program legislatif



dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Kota Denpasar sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 9 (sembilan) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.





Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, rincian urusan tersebut, diatur danditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Denpasar, dengan urusan wajib yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1). Pendidikan ;
- 2). Kesehatan ;
- 3). Lingkungan Hidup ;
- 4). Pekerjaan Umum ;
- 5). Penataan Ruang ;
- 6). Perencanaan Pembangunan ;
- 7). Perumahan ;
- 8). Kepemudaan dan Olah Raga ;
- 9). Penanaman Modal ;
- 10). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- 11). Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- 12). Ketenagakerjaan ;
- 13). Ketahanan Pangan ;
- 14). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- 16). Perhubungan ;
- 17). Komunikasi dan Informatika ;
- 18). Pertanahan ;
- 19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20). Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
- 21). Pemberdayaan Masyarakat ;
- 22). Sosial ;
- 23). Kebudayaan ;
- 24). Statistik ;



25). Kearsipan ; dan

26). Perpustakaan

sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

1). Kelautan dan Perikanan ;

2). Pertanian ;

3). Kehutanan ;

4). Energi dan Sumber Daya Mineral ;

5). Pariwisata ;

6). Industri ;

7). Perdagangan ; dan

8). Ketramigrasian ;

9). Pasedahan Agung ;

b. Tugas Pokok

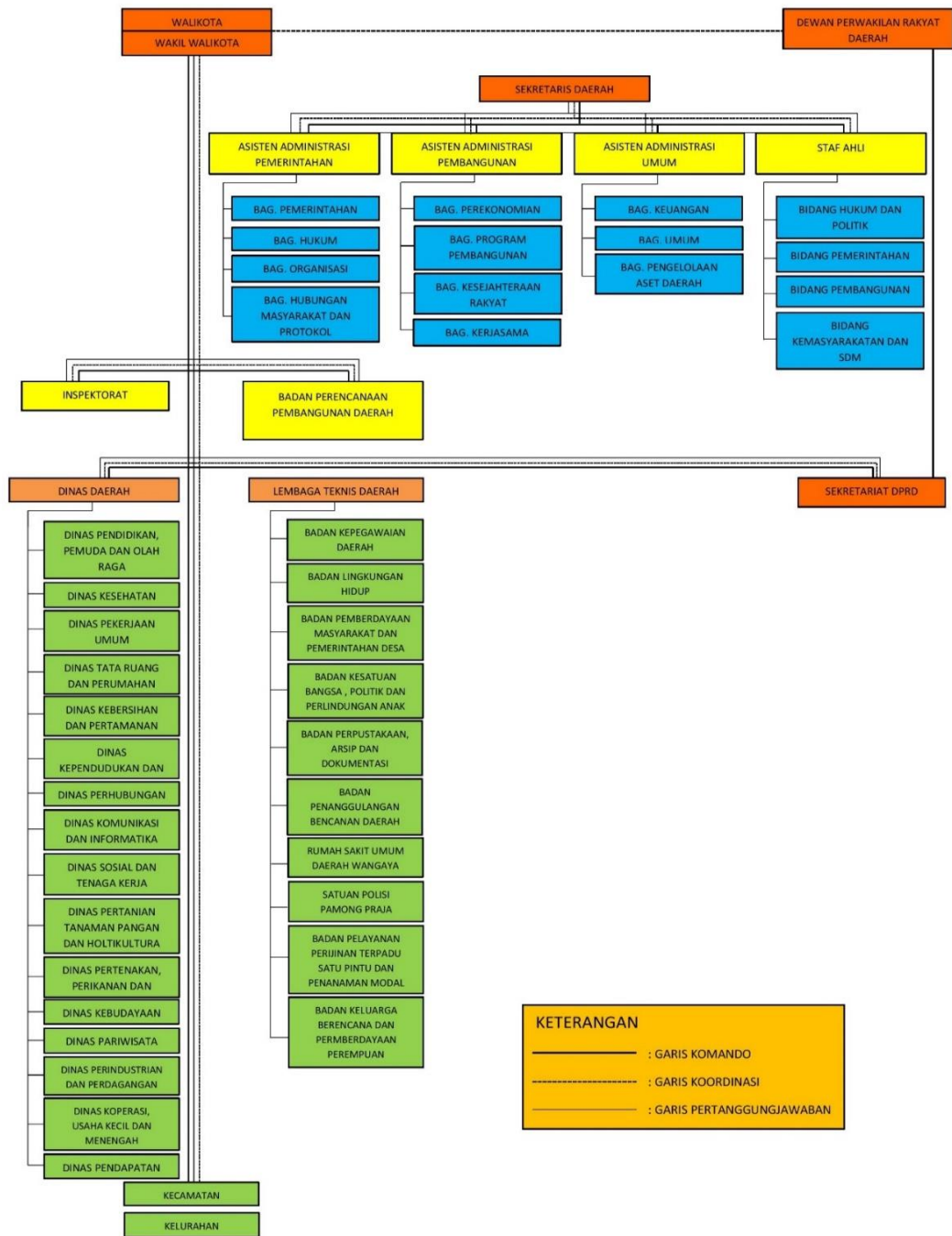
Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

C.3. Struktur Organisasi

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formal didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar berikut :





Gambar 1.5.
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar





D. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada per Juni Tahun 2018 sejumlah 5.796 orang, yang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :

Golongan I : 141 orang
Golongan II : 1.142 orang
Golongan III : 2.475 orang
Golongan IV : 2.038 orang

b. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselon II : 35 orang
Esselon III : 171 orang
Esselon IV : 597 orang
Esselon V : 3 orang

c. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 5.158 orang, terdiri atas :

- 1) Fungsional guru sebanyak 2.175 orang
- 2) Fungsional Medis dan Paramedis sebanyak 606 orang
- 3) JFT Lainnya 118 orang

d. Tingkat Pendidikan :

SD : 118 orang
SMP : 145 orang
SLTA : 1.319 orang
D1 : 47 orang
D2 : 402 orang
D3 : 437 orang
S1/D4 : 2.872 orang
S2 : 454 orang
S3 : 2 orang



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. RPJMD berupaya menyelesaikan isu-isu dan permasalahan yang terjadi di daerah melalui strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU
KEHARMONISAN”**

Denpasar kreatif adalah "Denpasar Kota Hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur



bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016- 2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu



berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.



3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan 5 (lima) tujuan, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan 1:

Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

Sasaran :

1) Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional ;

Indikator Kinerja :

- Luas Areal Subak yang dapat dipertahan (Hektar)
- Indeks Tri Hita Karana (Indeks)

2) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.

Indikator Kinerja :

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks).

b. Tujuan 2 :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

Sasaran :

3) Mengentaskan Kemiskinan

Indikator Kinerja:

- Angka Kemiskinan (%).

4) Mengurangi Pengangguran

Indikator Kinerja:

- Angka Pengangguran (%).



5) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja:

- Angka Harapan Hidup (Tahun)

6) Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja:

- Indeks Pendidikan (Indeks)

7) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja :

- Indeks Pembangunan Gender (Indeks)
- Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)
- Kategori Kota Layak Anak (Kategori)

8) Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja :

- Luas Permukiman Kumuh (%)

9) Meningkatnya kualitas Infrastruktur

Indikator Kinerja :

- Jalan Kondisi Baik (%)
- Titik Genangan (%)
- Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)
- Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)

c. Tujuan 3 :

Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)



Sasaran :

- 10) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
- Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)
- Predikat Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah (Kategori)

d. Tujuan 4:

Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan

Sasaran:

- 11) Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Indikator Kinerja:

- Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)
- Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)

- 12) Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Indikator Kinerja:

- Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).

- 13) Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Indikator Kinerja:

- Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).
- Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).

- 14) Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja:

- Peningkatan Nilai Investasi yang Tercatat di PTSP (%).



15) Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya

Indikator Kinerja:

- Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
- Lama Tinggal Wisatawan
 - Asing
 - Domestik
- Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)

e. Tujuan 5:

Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa

Sasaran:

16) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator:

- Sampah Tereduksi (%)
- Indek Lingkungan Hidup (Indeks).

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota No. 18A.Tahun 2015 dan telah direvisi dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017. Adapun



Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar
sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Memperkuat jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya
		3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	4	Mengentaskan Kemiskinan
		5	Mengurangi Pengangguran
		6	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
		7	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat
		8	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak
		9	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
		10	Meningkatnya kualitas Infrastruktur
		11	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak
		12	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
		13	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak
		14	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan





No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	10 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	15 Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)
			16 Indeks Kepuasan Masyarakat
			17 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11 Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	18 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori).
			19 Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)
		12 Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	20 Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)
			21 Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).
		13 Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22 Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).
			23 Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).
		14 Meningkatnya nilai investasi	24 Investasi yg tercatat di PTSP
		15 Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
			26 Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik
			27 Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya	16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28 Sampah tereduksi (%)
			29 Indeks LH



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
	berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa		

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.203.645.587.867 (50,87persen dari total Belanja pada APBD Kota Denpasar TA 2018 / sebesar Rp. 2.365.991.774.111,71).



Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2018

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	52.432.385.480
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	669.888.047.525
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>)	422.191.840.481
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare Society</i>) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	18.509.406.730
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	40.623.907.650

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2018

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA			SATUAN	TARGET 2018
1		2			3	4
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas yang dipertahankan	Areal Subak dapat	Hektar	2.382





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA			SATUAN	TARGET 2018
1		2			3	4
		2	Indeks Tri Hita Karana		Indeks	79,91
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan		Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan		Persen	2.10%
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran		Persen	3,40
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup		Tahun	74,27
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan		Indeks	N/A
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG		Persen	78,25%
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG		Persen	60%
		10	Katagori Kota Layak Anak		Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh		Persen	20%
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik		Persen	62,72
		13	Titik Genangan		Persen	20%
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi		Persen	44,86
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi		Persen	47,74%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	81
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah		Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Kategori	BB





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018
1		2		3	4
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,2%
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,2%
12	Meningatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100%
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	63
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2.5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	576,254
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
		- Asing		Hari	3,13
		- Domestik		Hari	3,10
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Juta rupiah	290.446,85
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	24
		29	Indeks LH	Indeks	53,63



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antar target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian



kinerja tahun 2018 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 97.48% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6 ¹⁾	7 ²⁾	8	9 ³⁾
1.	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	Luas areal subak yang dapat dipertahankan (ha)	2.409	2.382	2.170	91,10%	2.289	94,80 %
		Indeks Tri Hita Karana (indeks)	80,74	79,91	95.50	119.51 %	80,21	150%
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	2,27	2,10	2.24	99.86 %	2,00	99,76 %
4	Mengurangi Pengangguran	Angka Pengangguran	2,63	3,40%	1.82%	101.58%	3.25%	98.57%
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,17	74,27	74,27	100%	74,63	99,36%
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	12,45	12,55	12,56	100.01%	13,05	99,51%
7	Meningkatkan pengarus-	Indeks Pembangunan	96,07	78,25	96,88	118.63%	80	116.88%





No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6 ¹⁾	7 ²⁾	8	9 ³⁾
	tamaan gender dan Perlindungan anak	an Gender (%)						
		Indeks Pemberdayaan Gender (%)	58,50	60	58,80	91.20%	60	91.20%
		Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	100%	Nindya	100%
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Luas Permukiman kumuh (ha)	0,36% 183,74 Ha	21,65% 144,48 ha	55,17% 82,66 ha	133,52%	81.65 % 33.84 ha	73,52%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Jalan kondisi baik (%)	87,95%	62,72%	77,59	88,23	66,89%	115,99%
		Titik genangan (%)	7 titik	20% Turun 1.6 titik	25% 6 titik	105%	50%	75%
		Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	44,67%	44,86%	45,29%	100.43%	45,16%	100.13%
		Penduduk memanfaatkan air bersih terlindungi (%)	47,28%	47,74%	54,05%	106,31%	48,04%	106.46%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	84,99	81	80.016	98,79%	84	95,26%
		Opine BPK terhadap pengelolaan	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%





No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6 ¹⁾	7 ²⁾	8	9 ³⁾
		Keuangan daerah						
		Predikat sistem akuntabilitas kinerja	B	BB	BB	100%	AA	77.85%
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Pertumbuhan sektor Industri pengolahan dalam PDRB (%)	3%	3,2%	4,63%	101.43%	4 %	100,63%
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	6%	6,2%	7,83%	101.63%	6,8%	101,03%
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	Lembaga perkreditan desa sehat (%)	97,14% 34 LPD sehat	100% 35 LPD Sehat	34 LPD Sehat	97,14%	100% 35 LPD Sehat	97,14%
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi masyarakat Kecil	Usaha Mikro yang meningkatkan katagorinya menjadi usaha kecil (%)	0,50%	0,50%	0.50%	100%	0,50%	100%
		Koperasi yang SHU-nya meningkat (%)	60,48%	63%	63%	100%	75%	88%
14	Meningkatnya nilai Investasi	Investasi yang tercatat di PTSP	Rp 6.452.156.084.763,-	2,5% Rp 5.047.349.841.442,-	Rp 4.658.841.787.073,-	92,30%	2,5% Rp 5.435.443.725.344,-	85,71%
15	Meningkatkan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (org)	609.795	576.254	594.539	103%	667.086	89%



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6 ¹⁾	7 ²⁾	8	9 ³⁾
	berbasis Budaya							
		Lama Tinggal Wisatawan -Asing	3,12 hari	3,13 hari	3,13	100%	3,16 hari	99%
		-Domestik	3 hari	3,10 hari	3,10	100%	3,13 hari	99%
		Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan (dlm jutaan rupiah)	287.571	290.446,85	327.251.39	113%	305.003,89	107%
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sampah tereduksi	18,72	24%	22,32%	98,32%	30%	92,32%
		Indeks LH	N/A	51,33	53,56	102,91%	N/A	102,91%

Sumber data : Bappeda Kota Denpasar

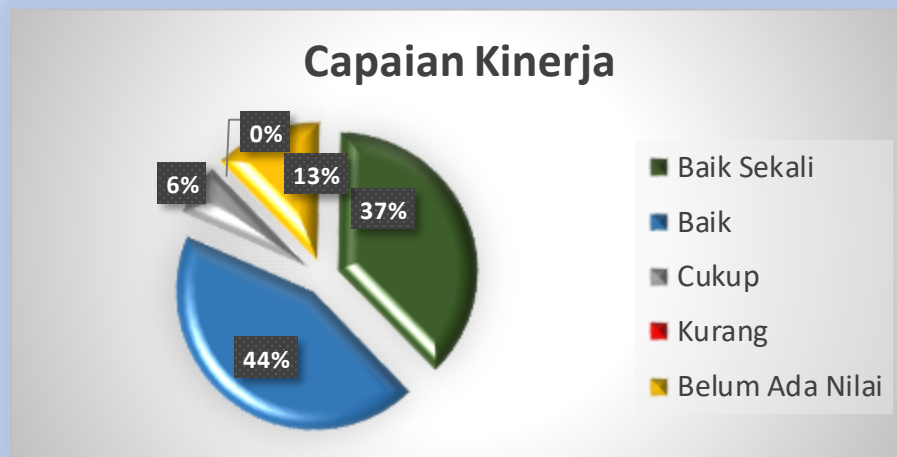
Skala penilaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 menggunakan skala seperti tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas



Gambar 3.1.
Grafik Capaian Kinerja

Dari 16 sasaran yang telah ditetapkan, sebanyak 6 sasaran dinyatakan “Baik Sekali”, 7 sasaran dinyatakan “Baik”, 1 sasaran dinyatakan “Cukup” dan 2 sasaran belum ada nilai dikarenakan nilai dari indeks Pendidikan dan Indeks Kebudayaan belum selesai di hitung oleh perangkat daerah terkait.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :



Tujuan 1. Menguatnya Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali

Untuk mewujudkan Tujuan Menguatkan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali, dalam tahun 2018 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
- b. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” yang telah ditetapkan, Denpasar harmonis dapat terwujud apabila masyarakat Kota Denpasar memegang teguh budaya dalam melaksanakan perikehidupannya. Budaya merupakan kekuatan Kota Denpasar, kekuatan ini sebagai faktor pembeda yang akan meningkatkan daya saing Kota Denpasar di tatanan global. Berkaitan dengan hal tersebut, budaya sebagai jatidiri masyarakat Kota Denpasar berupaya terus dimantapkan keberadaannya sehingga di era global ini budaya di Kota Denpasar tetap eksis keberadaannya dan bahkan berkembang tanpa tercabut dari akarnya.

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	



1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.409	2.382	2.170	91,10
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	80,74	79,91	95.50	119.51
Rata-rata Capaian Kinerja						105.305

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional yang terdiri dari 2 indikator sasaran, yaitu Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan dan Indeks Tri Hita Karana. Indikator sasaran Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan hanya sebesar 2.170 Ha dan indikator sasaran Indeks Tri Hita Karana sebesar 95.50 Rata-rata capaian kinerja sebesar 105.305 (Baik Sekali).

Terjadi penurunan lahan sawah sebesar 239 Ha ditahun 2018, hal ini disebabkan karena adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Amanat undang-undang ini harus diimplementasi oleh semua kabupaten di seluruh Indonesia termasuk Kota Denpasar, sehingga pada tahun 2018 dilaksanakan pemetaan terhadap lahan sawah secara spasial oleh Kementerian ATR melalui BPN Kota Denpasar dengan hasil luasan lahan pertanian 2.170 Ha.

Subak merupakan lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris religius yang ada di Bali sejak dahulu. Subak sebagai lembaga yang berperan di bidang pertanian dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari proses pengolahan lahan, pembibitan, pola dan tata cara tanam, pemeliharaan sampai kepada pengolahan serta pemasaran hasil-hasilnya. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi dinyatakan bahwa Subak adalah masyarakat hukum adat Bali yang bersifat sosio



agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari berbagai sumber air di dalam suatu daerah. Subak dapat eksis apabila tetap memiliki lahan pertanian, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan adalah berupaya tetap mempertahankan lahan pertanian di Kota Denpasar atau meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan.

Upaya untuk mempertahankan lahan pertanian tetap dilakukan antara lain melalui pemberian insentif kepada petani berupa pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada areal sawah yang berada dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0%, disamping peningkatan kapasitas subak baik berupa manajemen, komoditi pertanian maupun pembenahan infrastruktur irigasi.

Indeks Tri Hita Karana merupakan indeks spesifik daerah, Philosophy Tri Hita Karana menekankan pada konsep keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan manusia dengan alam (palemahan), yaitu :

(a) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Parhyangan*

1. Partisipasi *krama* dalam pembangunan, penataan, dan pemeliharaan tempat suci keagamaan;
2. Partisipasi *krama* dalam pembinaan keagamaan;
3. Partisipasi *krama* dalam peningkatan kualitas aktivitas sosial keagamaan;
4. Partisipasi *krama* dalam lembaga keagamaan;
5. Partisipasi *krama* dalam mewujudkan tri kerukunan umat beragama (sesama umat beragama, antar-umat



beragama, dan antarumat beragama dengan pemerintah).

(b) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Pawongan*

1. Partisipasi *krama* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Partisipasi *krama* dalam organisasi sosial kemasyarakatan;
3. Partisipasi *krama* dalam aktivitas sosial, seni, dan budaya;
4. Partisipasi *krama* dalam mendukung program-program pemerintah di bidang sosial kemasyarakatan;
5. Partisipasi *krama* dalam menciptakan kerukunan, keamanan, dan kedamaian di masyarakat.

(c) Partisipasi *Krama* pada Bidang *Palemahan*

1. Partisipasi *krama* dalam pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas umum;
2. Partisipasi *krama* dalam tata ruang dan wilayah;
3. Partisipasi *krama* dalam memelihara kualitas ruang publik;
4. Partisipasi *krama* dalam menjaga kualitas tanah, air, dan udara;
5. Partisipasi *krama* dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian lingkungan sekitarnya.

Untuk meningkatkan Indeks Tri Hita Karana dilakukan upaya-upaya yaitu :

- (1) Partisipasi *krama* di bidang *parhyangan* perlu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kesadaran



keagamaan masyarakat melalui pembinaan agama dan keagamaan.

- (2) Partisipasi *krama* di bidang *pawongan* perlu ditingkatkan lagi dengan mengembangkan kesadaran hukum dan kearifan lokal di masyarakat terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keharmonisan sosial.
- (3) Partisipasi *krama* di bidang *palemahan* perlu ditingkatkan lagi melalui peningkatan kesadaran lingkungan terutama memelihara kualitas kebersihan, kelestarian, dan fungsi lingkungan.

2) Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan dengan memberi ruang untuk mengikuti pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Kota Denpasar.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	



1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja						N/A

Indikator sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2018 belum dapat dihitung, namun usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan even budaya.

Sekaa yang ikut terlibat dalam festival budaya daerah pada tahun 2018 ditargetkan 100 sekaa ternyata antusias sekaa yang tinggi dan yang ikut dalam festival menjadi berjumlah 117 sekaa sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 117%. Capaian ini disebabkan pembinaan yang terus menerus dilakukan dan memberikan ruang yang lebih, baik kepada sekaa, sanggar maupun sekolah untuk ikut serta dalam berbagai even kesenian yang dilaksanakan di Kota Denpasar, seperti:

- Pesta Kesenian Bali.
- Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik.
- Festival ogoh-ogoh.
- Pementasan rutin sanggar setiap hari sabtu dan minggu di lapangan Puputan Badung.
- Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari-hari tertentu di Pura Jagatnatha.
- Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung.
- Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar setiap akhir tahun.
- Kaderisasi Pelestarian Budaya.
- Misi Kesenian ke Luar Daerah.





- Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali.
- Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan.

Jumlah sanggar yang ikut terlibat dalam pentas budaya berjumlah 44 sanggar sesuai dengan besaran target yang ditetapkan pada tahun 2018, sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 100%.

Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan pelekak yang biasanya dibuat oleh kaum remaja Bali sebagai suatu bagian dari perayaan tahunan “upacara pembersihan” (ngerupukan), yang dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi. Semua Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda di tingkat banjar) yang ada di Denpasar terlibat aktif dalam keikutsertaan parade ogoh ogoh ini sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya 100%. Pembinaan kepada STT salah satunya melalui lomba ogoh ogoh berupaya terus dilakukan, agar kreatifitas, gotong royong, seni gamelan, seni tari dan seni anyaman dapat terus dijaga bahkan dikembangkan sebagai salah satu aset budaya.



Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengentaskan Kemiskinan.
- b. Mengurangi Pengangguran
- c. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
- d. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan.
- e. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
- f. Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil.

3) Sasaran Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.



Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Mengentaskan Kemiskinan

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	Persen	2,27	2,10	2,24	99,86
Rata-rata Capaian Kinerja						99,86

Dari Tabel 3.4. diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 2,10%, penurunan hanya menjadi 2,24%. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 99,86%. Tetapi dari kondisi tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 2,27% menjadi 2,24%.

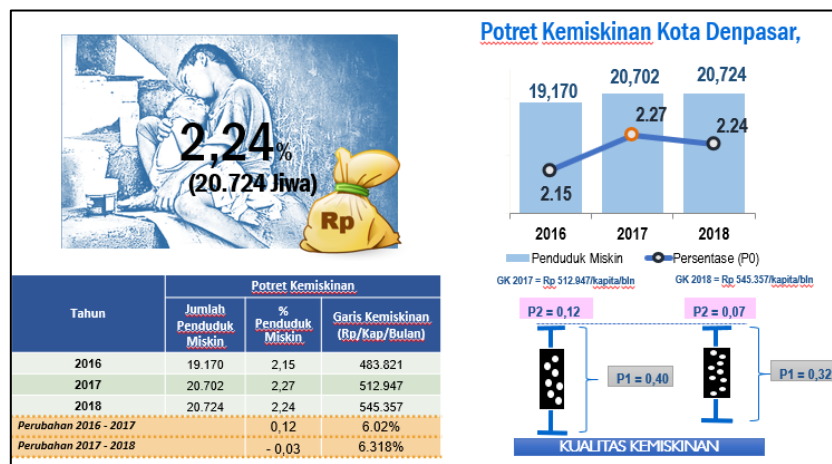
Penyebab kemiskinan di Kota Denpasar antara lain jumlah pendatang yang cukup tinggi. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di Kota Denpasar. Akibatnya, banyaknya pendatang justru membawa pada masalah pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan penduduk di Kota Denpasar. Tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) yang sangat kecil (P1=0,32 & P2=0,07 pada tahun 2018) sehingga pergeseran garis kemiskinan dari Rp.512.947,00 (tahun 2017) menjadi Rp.545.357,00 (tahun 2018) berdampak pada besarnya pertambahan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Denpasar.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskian adalah melalui 2 (dua) pendekatan yaitu melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Penambahan pendapatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM (Diklat, magang dan sertifikasi) serta



Pemberdayaan (permodalan, pendampingan, Kube, Pemanfaatan Teknologi, dan Pemasaran). Pengurangan pengeluaran dapat dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, papan, pangan, pengganti produktivitas, dan santunan kematian.

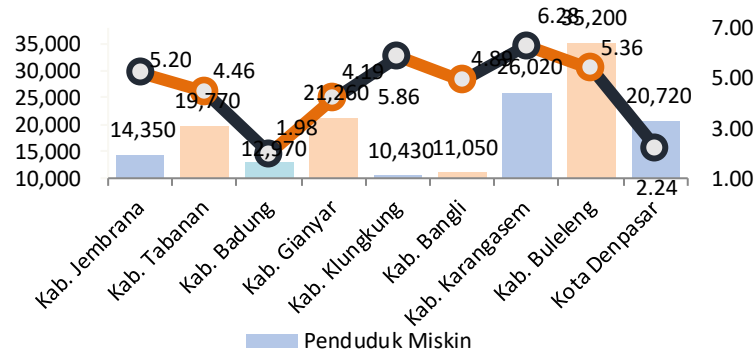
Bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali, maka penduduk miskin di Kota Denpasar paling rendah dibandingkan Kabupaten lainnya. Data selengkapnya disajikan pada Gambar 3.2. dan Gambar 3.3



sumber : BPS Kota Denpasar tahun 2018

Gambar 3.2.

Potret Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016-2018



Sumber : BPS Kota Denpasar tahun 2018

Gambar 3.3.

Kemiskinan Kab/Kota se-Bali Tahun 2018



4) Sasaran Mengurangi Pengangguran

Secara umum pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Mengurangi Pengangguran

Indikator Sasaran	Satuan	Keadaan Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	
1 Angka Pengangguran	Persen	2,63	3,40	1,82	101,58
Rata-rata Capaian Kinerja					101,58

Capaian Sasaran Strategis Mengurangi Pengangguran dengan Indikator Sasaran Angka Pengangguran, penghitungan terhadap TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada tahun 2018 tercapai 1,82 % dari target 3,40%. Pencapaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 101,58%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, maka tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan sebesar 0,81% di Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Bali, maka TPT Kota Denpasar menempati urutan kedua setelah Kabupaten Buleleng. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah :

- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
- pengembangan hubungan industrial



Tabel 3.7
Perbandingan TPT danTPAK se-Bali Tahun 2017 dan 2018

Kabupaten/Kota	TPT (%)		TPAK (%)	
	2017	2018	2017	2018
Kab. Jembrana	0.67	1.38	78.62	77.45
Kab. Tabanan	1.79	1.43	71.33	77.46
Kab. Badung	0.48	0.44	70.43	71.44
Kab. Gianyar	1.02	1.60	78.17	79.10
Kab. Klungkung	0.94	1.41	77.07	78.11
Kab. Bangli	0.48	0.80	84.14	85.85
Kab. Karangasem	0.72	0.99	78.37	82.50
Kab. Buleleng	2.41	1.84	75.44	76.87
Kota Denpasar	2.63	1.82	73.91	73.75

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Dalam penyebarluasan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dengan biaya murah, mudah dan cepat. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.



Portal atau Website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terhubung dengan Sistem Informasi Kartu Pencari Kerja AK/I (Kartu Kuning). Berdasarkan Database AK/1 sampai bulan desember 2018 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 888 orang yang terdiri dari 442 laki – laki dan 446 perempuan. Dari 888 orang pencari kerja sebanyak 395 orang sudah ditempatkan (200 laki – laki dan 195 perempuan).

Dalam usaha untuk mengurangi/menekan jumlah pengangguran di Kota Denpasar telah diselenggarakan JOB FAIR dengan harapan agar tenaga kerja yang ada di Kota Denpasar dapat terserap ke dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pencari kerja.



Gambar 3.4.
Pelaksanaan Job Fair di Kota Denpasar

5) Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan gambaran



kemampuan/ Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/ kegiatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	
1 Angka Harapan Hidup	Indeks	74,17	74,27	74,27	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada tahun 2018, BPS belum mengeluarkan data untuk angka harapan hidup tahun 2018.

Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai 74,04 Tahun. Pada tahun 2017 di targetkan sebesar 74,17 tahun, dapat terealisasi 74,17 tahun (100%). Pada tahun 2018 ditargetkan 74,27 tahun, realisasi diharapkan dapat 100% (dengan proyeksi tahun 2018 sebesar 74,27 tahun). Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar dapat tercapai dari beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai yaitu :



a. Angka Kematian Ibu

Selama tahun 2018 di Kota Denpasar terjadi 4 kematian ibu yang terdiri dari 2 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu nifas. Penyebab kematian ibu di Kota Denpasar adalah 1 orang karena perdarahan, 1 orang karena gangguan system peredaran darah dan 2 orang karena sebab lainnya. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian. Kegiatan lain juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Upaya – upaya yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu adalah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa setelah melahirkan (Nifas) dengan gerakan sayang ibu. Melalui upaya – upaya ini di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

b. Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2018 terjadi 10 kematian bayi dari 16.762 lahir hidup. Penyebab kematian bayi ini adalah karena Berat badan bayi rendah (BBLR) 2 orang, asfeksia 1 orang, sepsis 3 orang, kelaianan bawaan 2, pneumonia 2 orang dan karena sebab lainnya 2 orang. Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2018 terjadi pada usia kurang dari 28 hari. Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari



sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian karena infeksi. Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan Penyuluhan kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3) pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan

d. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku



Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS, terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi ASI eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah seminggu sekali
8. Makan buah dan sayur setiap hari
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Seluruh puskesmas di Kota Denpasar sudah berperan sebagai puskesmas santun lansia sehingga capaian kinerja ini sudah 100%. Pada tahun 2018 terdapat 65.575 Penduduk usia 60 tahun keatas di Kota Denpasar, dari jumlah tersebut 22.056 orang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (33,6%). Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena keterbatasan sarana skrining untuk lansia. Kedepannya perlu diperbaiki perencanaan anggaran dan advokasi ke pemegang kebijakan sehingga anggaran untuk pelayanan kesehatan lansia bisa disiapkan secara optimal dan capaian kinerja ini bias ditingkatkan.

6) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat



Pendidikan menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan. Keberadaan SDM yang handal, akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula. Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar pada Pendidikan antara lain:

1. Migrasi Penduduk sebagai konsekuensi daerah Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, maka Kota Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang diikuti dengan penambahan kelompok umur usia sekolah (Umur 2 – 15 Tahun) yang wajib dan berhak memperoleh pendidikan.
2. Untuk menampung kelompok umur usia sekolah diperlukan ketersediaan sekolah (Ruang Kelas) yang memadai sesuai jenjang pendidikan berdasarkan kelompok umur.
3. Untuk kepastian kelompok usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang layak, maka dilakukan penambahan daya tampung baik melalui peningkatan kapasitas terpasang maupun pembangunan unit sekolah baru.
4. Untuk menampung kelompok umur usia sekolah diperlukan Sumber daya manusia yang memadai dari segi kompetensi, kualitas, maupun kuantitas.
5. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kompetensi maupun kuantitas merupakan kendala dalam upaya menuju pelayanan prima kependudukan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga mutlak diperlukan guna mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya pendidikan kepemudaan dan olahraga



diperlukan sosialisasi tentang ketentuan – ketentuan administrasi.

8. Penuntasan pengembangan tempat pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga disetiap Kecamatan sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
9. Kebijakan pendidikan dari Pemerintah perlu direalisasikan melalui koordinasi dan dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota.

Untuk menangani isu strategis pada bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar ditempuh dengan mengarahkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses, pelayanan dan mutu pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, dengan mengoptimalkan dukungan masyarakat (stakeholder) untuk memberikan peluang yang lebih besar terhadap akses masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja dengan menciptakan sistem pelayanan bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan paradigma baru seperti revitalisasi, refungsionalisasi dan restrukturisasi terhadap sistem yang kurang responsif
3. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun termasuk pendidikan usia dini dan TK secara efisien,





bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia yang berlandaskan budaya Bali dan Agama Hindu.

4. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara.
5. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dan menciptakan peluang peningkatan kualitas SDM melalui kerjasama bidang pendidikan.
6. Meningkatkan daya saing SDM dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan kualifikasi minimum bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
9. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam



pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan.

10. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik dan wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme, pluralitas sosial dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.
11. Meningkatnya aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
12. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan penerapan teknologi tepat guna secara optimal guna mendukung program pembangunan Kota Denpasar.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
14. Membentuk pusat kajian bersama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Lembaga Pendidikan serta lembaga lainnya pada bidang pengembangan IPTEK.
15. Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor.
16. Mengoptimalkan kualitas kelembagaan pendidikan politik, pembinaan kepemimpinan, pengembangan potensi kewirausahaan, dan peningkatan keunggulan penguasaan iptek pemuda.
17. Membudayakan sportivitas olahraga sebagai elemen penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keunggulan daya saing.



18. Menumbuhkembangkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia sejak dini melalui pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah.
19. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.
20. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
21. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga termasuk kesehatan olahraga.
22. Meningkatkan minat / budaya baca masyarakat.

Hasil Analisis pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat pada Tahun 2018 terlihat seperti tabel 3.9 dibawah.

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pendidikan	Indeks	12,45	12,55	12,56	100,01
Rata-rata Capaian Kinerja						100,01

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dilihat dari Indeks Pendidikan sebesar 100,01% (sangat Baik). Adapun indikator pendukung capaian indeks pendidikan tersebut tercantum pada tabel 3.10.



Tabel 3.10
Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
					Target	Realisasi 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akses, mutu dan relevansi pendidikan	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	99.89	99	74.70	75.45
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	%	97.48	103	103.47	100.46
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	86.91	92.08	96.80	105.13
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	%	105.41	106.33	98.35	92.50
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	77.19	91.26	95.05	104.15
		Angka Melek Huruf	%	98.7	98.05	98.02	99.97
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.1	8.6	11.2	129.77
		Rasio Guru dan Murid :					
		a. SD/MI/Paket A	%	20	27.90	22.36	80.14
		b. SMP/MTs/Paket B	%	18	30.20	21.63	71.62
		Fasilitas Pendidikan :					
		a. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	73.17	64	95.70	149.53
		b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	80.79	72	95.01	131.96



2	Meningkatnya daya saing SDM	Angka Kelulusan (%) :					
		Angka Kelulusan SD/MI	%	99.8	99.98	100	100.02
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	101.93	99.98	99.93	99.95
3	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda	%	100	100	100	100.00

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Bila dibandingkan dengan capaian Indikator Pendidikan tahun 2017 maka dapat dilihat bahwa, angka melek huruf penduduk Kota Denpasar pada tahun 2018 mencapai 98,68 persen yang berarti bahwa 98,68 persen penduduk Denpasar sudah dapat membaca dan menulis. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan keberhasilan program pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar tahun 2018 sebesar 11,20 tahun. Angka Partisipasi Sekolah untuk umur 7-12 tahun sebesar 99,62 persen, Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 tahun sebesar 99,17 persen dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun sebesar 78,1 persen. Secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Angka Melek Huruf (persen)	98.68	98.7	98.68
	- Laki-Laki	99.69	99.7	99.1
	- Perempuan	97.62	97.7	96.88



No	Uraian	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2.	Rata-rata Lama Sekolah (persen)	11.14	11.15	11.20
3.	Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
	7 – 12 tahun	98.23	98.93	99.62
	13 – 15 tahun	97.85	98.57	99.17
	16 – 18 tahun	78.19	80.22	73.1
	19 - 24 Tahun	31.99	35.68	34.24

Sumber Diolah :BPS Kota Denpasar, 2018

7) Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia, penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang. Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Isu kesetaraan gender di Kota Denpasar antara lain :

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD), yang juga dipengaruhi oleh faktor budaya



2. Belum maksimalnya tingkat pendidikan perempuan, serta belum beraninya perempuan untuk tampil dan perempuan juga disibukkan mengurus RT
3. Belum Optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan KB

Kebijakan pembangunan gender di Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik melalui perumusan kebijakan , sosialisasi, advokasi partai politik, advokasi organisasi perempuan dan Pelatihan pendidikan politik perempuan.
2. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui perumusan kebijakan, sosialisasi, advokasi pelatihan di bidang ekonomi.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak terkait, koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengembangan KIE, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, serta pencatatan data kekerasan/kasus perempuan dan/atau anak.
4. Penguatan kelembagaan dan pembentukan kelembagaan layanan kualitas keluarga melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan, koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan kualitas keluarga dlm mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak.



Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 dirinci pada Tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,07	78,25	96,88	118.63
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,50	60	58,80	91.20
3	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	100
Rata-rata Capaian Kinerja						103.27

Sumber : DP3AP2KB, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender realisasinya melampaui target, indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender realisasinya tidak mencapai target dan indikator sasaran kategori kota layak anak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 103,27% (Baik Sekali).

Indek Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan



taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak di Kota Denpasar Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak
Kota Denpasar Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Gender	96,55	96,07	96,88
2	Indek Pemberdayaan Gender	58,50	58,50	58,80
3	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber : Dinas PPPA&PPKB Kota Denpasar, 2018

8) Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Kekumuhan yang terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik tersendiri, dimana kekumuhan terjadi pada lahan persil hak milik, yang disewakan dalam waktu jangka panjang. Sinergitas penanganan kumuh terus dilakukan sehingga terjadi keterpaduan pendanaan dan program antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar OPD di Kota Denpasar.

Capaian terhadap upaya Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Luas Permukiman Kumuh	Persen	0,36% 183,74 ha	21,65% 144,48 ha	55,17% 82,66 ha	133,52%
Rata-rata Capaian Kinerja						133,52%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan realisasinya mencapai 55,17% dari target 21,65% dari luas permukiman kumuh di Kota Denpasar tahun 2016 seluas 184,40 ha menjadi 82,66 ha. Capaian kinerja sasaran ini sebesar 133,52% (Baik Sekali). Hal ini disebabkan karena :

- Dari 36 kawasan yang ada berdasarkan perhitungan analisa numerik Permen PU Nomor 2 Tahun 2016, semuanya termasuk katagori kumuh ringan, fokus penanganan bisa lebih terarah pada indikator jalan dan drainase untuk menurunkan score kumuh.
- Penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik pusat, pemerintah Kota, Desa/Kelurahan serta pemilik lahan sendiri.
- Kawasan kumuh yang memiliki luasan diatas 15 ha, dituntaskan melalui dana APBN (Kertapura Segina dan Pemogan) masih menyisakan 2 kawasan di Karya Makmur dan Wanasari.
- Luasan dibawah 10 Ha ditangani oleh OPD teknis (PUPR dan Perkim)



9) Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang telah bertumbuh menjadi kota metropolitan dengan beragam aktivitas yang membutuhkan kecepatan mobilitas. Disisi lain Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian dan jasa lainnya dan terletak pada lintasan pergerakan penduduk antar kabupaten.

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur di Kota Denpasar sudah cukup memadai dan berkualitas baik, namun demikian masih dibutuhkan pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.

Tantangan permasalahan pembangunan infrastruktur yang harus disikapi antara lain kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peraturan pemerintah yang sering berubah dan tumpang tindih antar peraturan/perundangan merupakan tantangan permasalahan eksternal yang harus disikapi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, produktif



dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada :

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan kota
2. Meningkatkan kualitas dan dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat
3. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir
4. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terintegrasi
5. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita
7. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai
8. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar
10. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung



11. Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan.
12. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Kota Denpasar pada tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Jalan Kondisi Baik	Persen	87,95%	62,72%	77,59	88,23
2	Titik Genangan	Persen	7 titik	20% Turun 1.6 titik	25% 6 titik	105%
3	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	44,67%	44,86%	45,29%	100,43%
4	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih terlindungi	Persen	47,28%	47,74%	54,05%	106,31%
Rata-rata Capaian Kinerja						99,99%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator belum mencapai target, dan 3 indikator sasaran telah melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 99.99% (Sangat Baik).

Kualitas jalan yang baik dan mantap di Kota Denpasar sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar maupun masyarakat komuter yang menuju/melintasi Kota



Denpasar sangat tinggi sehingga akan meningkatkan resiko keselamatan pengguna jalan apabila kondisi/kualitas jalan yang tidak baik dan tidak mantap. Masalah kemantapan jalan menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemantapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga. Dengan kualitas jalan yang baik dan mantap diharapkan akan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko keselamatan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar.

Disamping kemantapan jalan, umur pakai jalan juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan semakin berkembangnya wilayah permukiman masyarakat di Kota Denpasar maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap meningkatkan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat ke pusat-pusat kegiatan (PK). Dengan meningkatnya aksesibilitas menuju PK diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana misi pemerintah Kota Denpasar.



Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar merupakan masalah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata, perlintasan transportasi darat antar daerah dan antar pulau serta pusat ibukota Propinsi Bali. Kemacetan lalu lintas khususnya pada jalan utama di Kota Denpasar disebabkan berbagai faktor selain karena kualitas jalan dan kuantitas jalan adalah disebabkan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor, tidak disiplinnya pengguna jalan dalam berlalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan, penggunaan kendaraan bermotor (mobil) untuk mengantar dan menjemput siswa sekolah, dan banyaknya persimpangan jalan yang menyebabkan melambatnya laju kendaraan. Mengingat rata-rata bentang jalan di wilayah Kota Denpasar yang pendek dan dengan lebar yang tidak sepadan dengan volume kendaraan, mengakibatkan kemacetan di satu ruas jalan berdampak pada ruas jalan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya pemeliharaan jalan guna mengurangi pelambatan laju kendaraan dan melakukan peningkatan jalan khususnya jalan tembus jalan alternatif untuk memecah arus lalu lintas dengan maksud untuk mengurangi kemacetan pada satu titik ruas jalan yang dapat berdampak kemacetan pada ruas jalan yang lain.

Penanganan daerah rawan genangan / banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah genangan yang cukup tinggi dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dampak bagi kelancaran transportasi, kesehatan lingkungan dan fasilitas permukiman masyarakat. Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya daerah pemukiman masyarakat dan adanya



pengalihan fungsi lahan (terlampir peta daerah rawan genangan/banjir). Namun demikian Pemerintah Kota Denpasar mengupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah meningkatnya daerah rawan genangan/banjir guna mencegah sebaran dampak genangan/banjir. Keterbatasan dana mengharuskan memilih prioritas dalam penanganannya. Tahun 2018 ditargetkan adanya pengurangan 2 lokasi genangan dan dapat direalisasikan semuanya yang berarti tingkat pencapaiannya sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah titik genangan adalah pembuatan beberapa sodetan, rekonstruksi penampang basah saluran dan normalisasi saluran secara bertahap.

Rumah Tangga terakses Sistem Jaringan Sanitasi ditargetkan 44,86% tercapai 45,29% (81.563 SR).

Capaian Penduduk yang memanfaatkan air bersih terlindungi pada tahun 2018 sebesar 54,05% termasuk 200 Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan pemasangan sambungan pipa air bersih gratis.

Tujuan 3. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Keperintahan yang baik (good governance)

10) Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus



sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) dalam tahun 2018 ditetapkan sasaran strategis yaitu, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Tabel 3.16

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017
				Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,99	81	80.016	98,79%
2	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100
3	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	BB	BB	100
Rata-rata Capaian Kinerja						99.60



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel realisasinya telah mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 99.60% (Baik).

Sewaka Dharma merupakan filosofi yang digali dari Budaya Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sewaka Dharma mengandung arti bahwa melayani merupakan kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat dan melayani sebagai bagian dari ibadah kebaikan. Indeks Survey kepuasan layanan masyarakat ini diperoleh dari merata-ratakan nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada OPD Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas, dan Rumah Sakit Wangaya.

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2018 kembali menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena atas hasil pemeriksaan keuangan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017. Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.





Gambar 3.5.

Walikota Denpasar diwakili Bapak Asisten III menerima Piagam Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kementerian Keuangan RI dengan Predikat WTP

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Denpasar pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 70,07 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah tertuang dalam rekomendasi



dari Kementerian PAN & RB kepada Walikota Denpasar untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ke depan.

Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan dan sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2017. Didalam Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya didalam penyelarasan penjabaran indikator kinerja utama sampai ke level eselon IV dilakukan perubahan mekanisme dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana sebelum Forum Perangkat Daerah dilakukan dengan acara Ceremonial, sekarang dilakukan dengan presentasi masing-masing Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah memaparkan keselarasan IKU Daerah ke IKU Perangkat Daerah. Selain dari mengubah mekanisme perencanaan, juga telah dilaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan mendatangkan narasumber baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Pusat.

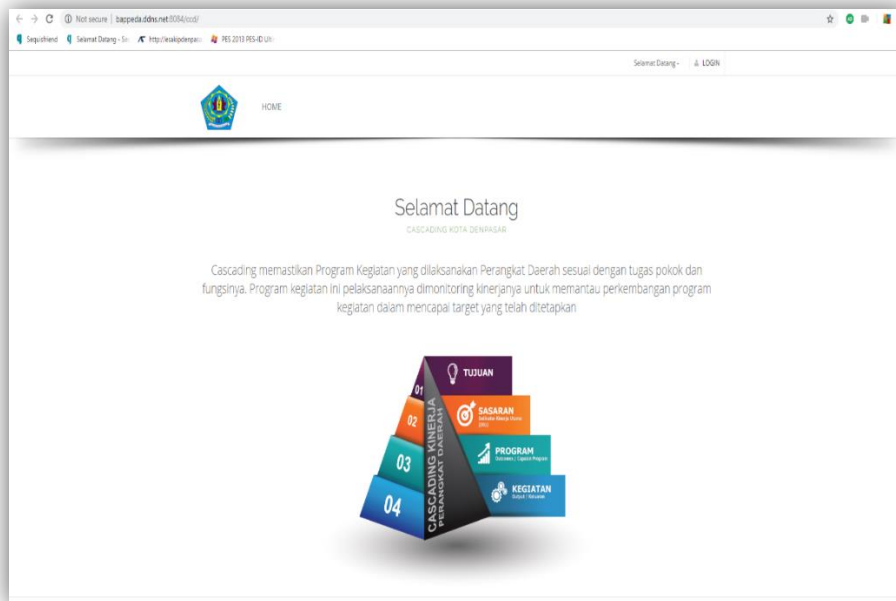
Pada indikator kinerja nilai SAKIP Pemerintah Kota Denpasar pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja kecendrungan mengalami kenaikan. Dari hasil evaluasi atas



kinerja akuntabilitas instansi pemerintah yang dilakukan oleh Tim Kementrian PAN & RB , maka capaian terhadap nilai komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja selama tahun 2018 menunjukkan nilai 39,78. Capaian indikator tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar nilai 39 dan persentase capaian pada tahun 2018 sebesar 102%. Adapun total nilai perencanaan dan pengukuran kinerja dari tahun 2015 s/d tahun 2017 antara lain : tahun 2015 mencapai nilai 32,66 dan tahun 2016 mencapai nilai 34,62 dan tahun 2017 mencapai nilai 37.87. Upaya-upaya yang dilakukan kedepan adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sehingga perencanaan kinerja dan indicator kinerja dapat berorientasi pada hasil (merapikan /membenahi pohon kinerja dan cascade OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- b. Melakukan reviu terhadap program , kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan dengan prioritas untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan
- c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penerapan manajemen kinerja dengan integrasi system perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.





Gambar 3.6.
Sistem Logical Framework dan Cascading

Tujuan 4. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan

11) Sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Sebagai daerah perkotaan di Denpasar terdapat banyak perusahaan industri mulai dari home industri hingga industri dengan kapasitas besar yang melibatkan banyak tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir, PDRB lapangan usaha industri terhadap PDRB Kota Denpasar terus mengalami peningkatan.

Pencapaian indikator persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB target tahun 2018 sebesar 3,2 % dengan realisasi sebesar 4,63% tingkat capaian sebesar 145



%, capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan dimana penghitungannya menggunakan proyeksi PDRB sektor industri tahun 2018 karena pada saat laporan ini disusun Badan Pusat Statistik Kota Denpasar belum merilis PDRB sektor industri pengolahan tahun 2018, namun demikian data pembanding yang digunakan adalah PDRB sektor industri pengolahan tahun 2013-2017 (sumber data Kota Denpasar Dalam Angka 2018 - Badan Pusat Statistik Kota Denpasar)

Pencapaian indikator persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB target tahun 2018 sebesar 6,2 % dengan realisasi sebesar 7,83 % tingkat capaian sebesar 126 %, capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan dimana penghitungannya menggunakan proyeksi PDRB sektor perdagangan tahun 2018 karena pada saat laporan ini disusun Badan Pusat Statistik Kota Denpasar belum merelease PDRB sektor perdagangan tahun 2018, namun demikian data pembanding yang digunakan adalah PDRB sektor perdagangan tahun 2013-2017 (sumber data Kota Denpasar Dalam Angka 2018 - Badan Pusat Statistik Kota Denpasar)

Pencapaian indikator persentase jumlah peningkatan nilai ekspor Kota Denpasar target tahun 2018 adalah sebesar Rp.531.933.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.723.554.414.960,00 tingkat capaian sebesar 136 %. Capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan dimana jumlah peningkatan nilai ekspor yang mengalami peningkatan cukup tinggi adalah dari hasil kerajinan, hasil pertanian dan hasil lain-lain yang memberikan kontribusi cukup besar pada peningkatan nilai ekspor kota Denpasar (sumber data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar)Capaian Sasaran



Strategis Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	
1 Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3%	3,2%	4,63%	101.43%
2 Pertumbuhan sektor perdangan dalam PDRB	Persen	6%	6,2%	7,83%	101.63%
Rata-rata Capaian Kinerja					101.53%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan realisasinya telah mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 101.53% (Baik Sekali).

12) Sasaran Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bernaung dibawah Desa Pakraman memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di pedesaan. Keuntungan LPD digunakan untuk membangun kehidupan religius warga berikut kegiatan upacaranya. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan untuk mendorong agar



seluruh LPD memiliki likuiditas yang baik sehingga masuk dalam katagori sehat.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100	100	97,14	97,14
Rata-rata Capaian Kinerja						97,14

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Lembaga Perkreditan Desa Sehat realisasinya telah mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 97,14% (Baik).

Setiap Desa Pakraman di Kota Denpasar memiliki LPD sehingga LPD di Kota Denpasar berjumlah 35 unit. Sampai dengan tahun 2018, capaian LPD yang termasuk dalam kategori sehat sebanyak 34 LPD dan sebanyak 1 LPD dalam kategori kurang sehat. Hal ini disebabkan karena 1 LPD tersebut masih kurang modal yang disetor sehingga berpengaruh terhadap tingkat likuiditasnya.

13) Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil dimaksudkan sebagai upaya membangun dengan sasaran masyarakat kecil melalui pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya



sehingga secara ekonomi akan bergerak menjauh dari garis kemiskinan dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar.

Disadari selama ini masyarakat kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan usaha akibat minimnya agunan yang dimiliki untuk mengakses permodalan. Kecilnya permodalan berkaitan erat dengan besaran skala usaha yang dilakukan. Atas dasar pemahan tersebut, penerbitan ijin SIUP Kecil dapat dikaitkan dengan aktifitas peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan UMKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Bali khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Ini mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sejumlah 30.145 usaha mikro dan koperasi 1.064 unit sampai dengan tahun 2018 dengan kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Denpasar. Oleh Karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM



terutama kredit investasi. Untuk menentukan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.



Gambar 3.7.

Walikota Denpasar menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Koperasi Berprestasi

Strategi dan Kebijakan strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

- (1) Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi
- (2) Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan UMKM

Tabel 3.19

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50	0,50	0,50	100
2 Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	60,48	63	63	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil realisasinya telah mencapai target dan indikator sasaran Koperasi yang SHU-nya meningkat realisasinya melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 100% (Baik).

Pada indikator Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,50 % atau sebesar 0,50% (150 Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha Kecil), dalam hal pencapaian Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun kelapangan juga Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.





Gambar 3.8.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar saat membuka pelatihan kewirausahaan

2. Penyediaan Informasi Pasar

Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Tumbuhnya wira usaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk



usahnya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memfasilitasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional. Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.
- b. Pameran Dalam maupun Luar Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Dimana setiap ajang promosi yang



dilaksanakan selalu berusaha untuk mengandeng para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM.



Gambar 3.9.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dengan Peserta Pameran di
Stand Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar rangka
Pameran Inacraft





Gambar 3.10.

Fasilitasi dengan mengikutsertakan UMKM Kota Denpasar
pada Pameran Inacraft di Jakarta Convention Centre
Jakarta

Pada indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 63 % atau 638 unit koperasi atau apabila dilihat dari data keraagn koperasi se Kota Denpasar dapat dilihat pencapaian SHU koperasi secara keseluruhan sebesar Rp. 90.356.094.273 atau meningkat 2% daripada tahun 2017 yang sebesar Rp. 92.163.216.158 atau dalam hal ini dimana SHU ini merupakan pendapatan atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mana keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. untuk pencapaian persentase koperasi yang SHU nya meningkat, dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi



pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti:

1. Pembinaan, Di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi, pembinaan dilakukan baik dari sisi kelembagaan atau pun dari SDM pengelola koperasi yang dilakukan dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikuti sertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri. sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.



Gambar 3.11.

Assisten III, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Ketua Dekopinda dan peserta diklat, saat pembukaan Diklat Sertifikasi Kompetensi



2. Pengawasan, untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan perekonomian daerah, dimana akan mengurangi resiko dari investasi ilegal yang merugikan masyarakat dimana mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.



Gambar 3.12.

Pelaksanaan Monitoring perkuatan permodalan bagi koperasi

3. Penyediaan Informasi pasar, untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit

daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan agar dimana koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan lewat KUR maupun ke LPDB-kemenkop UKMRI.



Gambar 3.13.

Kepala Dinas Koperasi saat melihat stand pameran koperasi yang ikut serta dalam rangkaian Pameran Harkopnas Expo 2018 di Hall 8 Indonesia Convention Centre (ICE) BSD City Tangerang Selatan, Banten

14) Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Arah Kebijakan Strategis Bidang Investasi di Kota Denpasar diarahkan pada penyederhanaan terhadap perijinan dan meningkatkan kualitas laju perijinan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi disajikan pada tabel berikut :



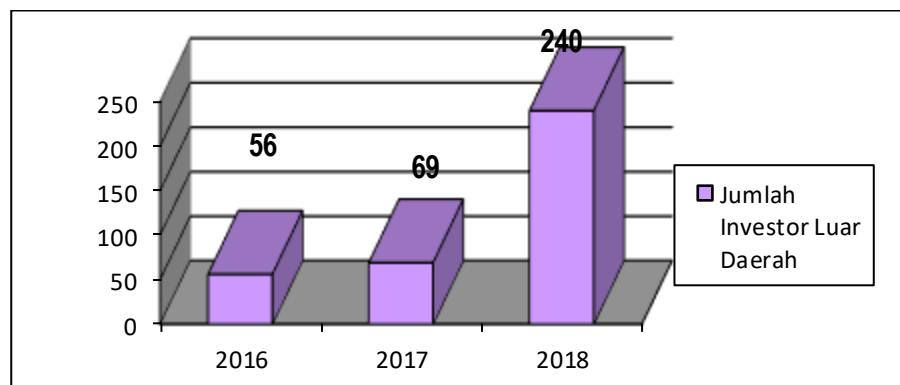
Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
				Target	Realisasi	
1	Investasi Yang Tercatat pada PTSP	Persen	Rp.6.452.156.084.763,-	2,5% Rp.5.047.349.841.442,-	Rp.4.658.841.787.073,-	92,30%
Rata-rata Capaian Kinerja						92,30%

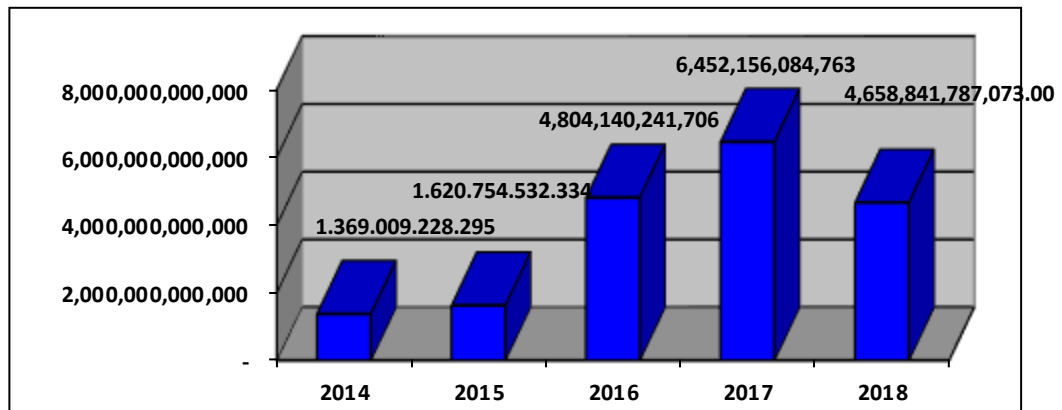
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Investasi Yang Tercatat pada PTSP capaiannya sebesar 92,30% (Baik).

Pengukuran indikator kinerja Persentase peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar mulai lakukan pada tahun 2017 setelah adanya perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Denpasar. Adapun jumlah investor luar daerah pada tahun 2016 sebanyak 56 investor luar daerah, tahun 2017 sebanyak 69 investor luar daerah dan tahun 2018 sebanyak 240 investor luar daerah.



Gambar 3.14.
Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar Tahun 2016-2018





Gambar 3.15.
Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2014-2018

Pada Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar dari tahun 2014 s/d 2018 mengalami fluktuasi dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 34,30 % dari tahun 2016 dan apabila dibandingkan dengan target maka pencapaian tahun 2018 sebesar 92,30, %. Adapun jumlah investasi tahun 2013 sebesar Rp.3.263.346.102.926,00, tahun 2014 sebesar Rp.1.369.009.228.295,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.620.754.532.334,00, tahun 2016 sebesar Rp.4.804.140.241.706,00, tahun 2017 sebesar Rp.6.452.156.084.763,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.4.658.841.787.073,00.

15) Sasaran Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

Sebagai ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi, dan didukung berbagai fasilitas wisata yang lengkap sehingga membuat liburan para wisatawan menjadi menyenangkan. Kota Denpasar merupakan kota di Pulau Bali yang memiliki



pertumbuhan industri pariwisata yang baik. Kota Denpasar juga menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya mendorong pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar, yang tidak terlepas dari arah dan kebijaksanaan kepariwisataan Provinsi Bali yang mengembangkan pariwisata budaya dengan didukung budaya Bali yang bernafaskan agama Hindu. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan bentuk pelayanan yaitu akomodasi, transportasi dan jasa-jasa lainnya. Langkah-langkah terarah dan terpadu tersebut terus ditingkatkan untuk mendukung kepariwisataan. Diharapkan upaya pembangunan dilakukan dapat mendukung perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Arah Kebijakan Strategis Bidang Pariwisata di Kota Denpasar diarahkan pada :

- (1) Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai agama Hindu dengan mengembangkan obyek, daya tarik wisata, dan atraksi wisata, pembinaan dan peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat termasuk desa adat.
- (2) Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan koordiansi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian kerakyatan.



- (3) Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi.



Gambar 3.16.

Promisi Pariwisata Budaya Kota Denpasar di TMII Jakarta

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	609.795	576.254	594.539	103
2 Lama Tinggal Wisatawan					
- Asing	Hari	3,12	3,13	3,13	100
- Domestik	Hari	3	3,10	3,10	100
3 Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan	Juta Rupiah	287.571	290.446,85	327,251.39	113
Rata-rata Capaian Kinerja					104



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan dan indikator sasaran Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, realisasinya telah melampaui target dan indikator sasaran Lama Tinggal Wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik realisasinya telah mencapai mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 104% (Baik Sekali).

Pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar terus diupayakan karena sektor ini merupakan salah satu tulang punggung (leading sector) bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya di Kota Denpasar. Pengembangannya mengarah pada pengembangan pariwisata budaya sejalan dengan Visi “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar pada tahun 2018 meningkat sebesar 5.82% atau dari target 576.254 orang menjadi 609.795 orang. Namun dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 menurun sebesar 2.5% atau dari 625.431 orang menjadi 609.795 orang. Hal ini sebagai akibat pengaruh Erupsi Gunung Agung yang terjadi pada bulan September sampai bulan Desember 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2017 diukur dari target RPJMD sudah melebihi pencapaian optimal.

Selanjutnya lama tinggal wisatawan menjadi sasaran penting selain meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dengan lama tinggal wisatawan yang lebih panjang, diharapkan akan memberikan kesempatan bagi wisatawan dalam berbelanja atau membeli produk/jasa



pendukung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor riil. Tercatat rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Denpasar masih tetap dipertahankan sesuai target yang sudah dipasang. Untuk wisatawan asing rata-rata lama tinggal selama 3.13 hari dan domestik sebesar 3.10 hari. Namun demikian upaya untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mesti terus diupayakan baik melalui pengembangan destinasi wisata, pembangunan sarana prasana dan peningkatan jaringan promosi.

Meningkatnya penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata di Kota Denpasar pada Tahun 2018 akan berdampak pada perkembangan tingkat perekonomian daerah. Tercatat kontribusi penerimaan pajak dari sektor pariwisata di Kota Denpasar pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 113% dari target Rp. 290.446,85 dapat terealisasi Rp. 327,251.39

Tujuan 5. Memperkuat keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan /Ida Sang Hyang Widhi Wasa

16) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mendorong kesadaran masyarakat Kota Denpasar guna peduli terhadap lingkungan hidupnya.



Dalam upaya untuk pelestarian lingkungan hidup di Kota Denpasar, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pengusaha, serta sekolah wajib untuk berperan aktif karena kita perlu sadari bahwa lingkungan merupakan tempat manusia tinggal dan memperoleh penghidupan. Selain itu, Bali yang terkenal dengan wisata alamnya, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan agar para wisatawan nyaman saat berkunjung ke Bali dan masyarakatpun nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali mempunyai permasalahan yang kompleksitas termasuk masalah sampah, dimana sampai saat ini Kota Denpasar belum dapat secara maksimal dalam mengelola management persampahan disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.

Disadari/ tidak sebenarnya sampah merupakan bagian dari keseharian kita. Setiap aktivitas manusia, pasti menghasilkan buangan sampah. Persoalan seperti ini, tidak dapat dibiarkan begitu saja, kita harus bersikap untuk mengupayakan pengelolaan dan pemilihan sampah mulai dari tingkat rumah tangga.

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi	
1 Sampah Tereduksi	Persen	18,72	24	22,32	98,32
2 Indeks LH	Indeks	N/A	51,33	53,56	102,91
Rata-rata Capaian Kinerja					100,62



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Sampah Tereduksi tidak mencapai target dan indikator sasaran indeks Lingkungan Hidup baru mulai dihitung tahun 2018 dengan hasil 53,56. Rata-rata capaiannya sebesar 100,62% (Sangat Baik).

Persentase volume sampah yang tereduksi di Kota Denpasar tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 18,72%. Peningkatan capain kinerja ini didukung oleh keberhasilan dalam pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Pada tahun 2018, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, upaya 3R (reduce, reuse, recycle), pembentukan bank sampah, komposting, dan penyusunan peraturan terkait dengan pengelolaan persampahan, termasuk penerbitan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Penetapan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah.

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung capaian pelaksanaan sasaran meningkatnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan menggunakan 61 unit *dump truck*, 21 unit *armroll truck* dan 133 unit *container* sampah. Kondisi sarana armada sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.



2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan diwujudkan melalui pembentukan bank sampah. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Untuk tahun 2018, jumlah bank sampah yang ada di Kota Denpasar sebanyak 100 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 dimana jumlah bank sampah sebanyak 78 unit pada tahun 2017 dan 69 unit pada tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah telah meningkat sehingga kedepan diharapkan jumlah sampah yang dibawa ke TPA dapat dikurangi.



Gambar 3. 17

Antusiasme Siswa-siswa Sekolah dalam Menabung Sampah di Bank Sampah



3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemecahan masalah sampah di Kota Denpasar dapat tercapai antara lain dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat Kota Denpasar dalam upaya pengelolaan sampah. Pengelolaan dimaksud dimulai dari tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan cara merubah perilaku masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Dalam upaya bersosialisasi kepada masyarakat inilah dibentuk tenaga juru pantau lingkungan (JUMALI). Juru Pantau Lingkungan (JUMALI) saat ini berjumlah 50 orang, JUMALI berperan penting sebagai mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ permasyarakat tata kelola persampahan, memonitoring/ mengidentifikasi sumber sampah, melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, berperan sebagai penggerak dan pengawasan terhadap masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Adapun pada tahun 2018 jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan dari petugas Jumali sejumlah 17.799 orang.

4. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Plastik Sekali Pakai Lainnya

Selain upaya-upaya tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar di tahun 2018 juga gencar berupaya melaksanakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Plastik Sekali Pakai Lainnya. Hal ini mengingat sampah plastik yang sifatnya sulit terurai tersebut masih banyak ditemukan di Tempat Penampungan Sampah di Kota Denpasar yang kemudian berujung di TPA Suwung. Kondisi laut dan pantai di beberapa titik di Kota Denpasar beberapa waktu lalu juga sempat dipenuhi sampah plastik. Hal serupa juga ditemui di



beberapa lokasi sungai dan mangrove. Ditambah lagi dengan adanya beberapa kejadian mengenai dampak sampah plastik terhadap matinya biota laut seperti pemberitaan yang terjadi beberapa waktu lalu tentang ditemukannya seekor penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang merupakan satwa dilindungi di perairan Pantai Penarukan, Singaraja, yang mati akibat memakan sampah plastik serta viralnya video wisatawan Inggris yang sedang melakukan penyelaman di perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan kondisi laut dipenuhi sampah plastik. Selain itu, sampah plastik juga diketahui dapat terurai menjadi mikroplastik yang berbahaya bagi biota laut apabila termakan sehingga pada akhirnya juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Terlebih lagi, Kota Denpasar merupakan salah satu destinasi wisata dunia, sehingga upaya pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik dapat mendukung terwujudnya sapta pesona Kota Denpasar. Di samping itu, inovasi ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target nasional pengurangan sampah sesuai Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 serta mendukung target pencapaian RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% sampai tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, program ini dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan sampai akhirnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Tahapan pelaksanaan tersebut diawali dengan melakukan survei dan



pendataan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pendataan dengan mengambil sampel di 95 toko dan pusat perbelanjaan di Kota Denpasar pada bulan Mei-Juni 2018 diperoleh bahwa rata-rata konsumsi kantong plastik di Kota Denpasar mencapai 1.086.114 lembar/bulan, sehingga diperkirakan dalam setahun konsumsi kantong plastik tersebut mencapai 13.033.368 lembar. Angka tersebut relatif tinggi jika dibandingkan dengan data asumsi penggunaan kantong plastik per 100 gerai di Indonesia yang mencapai 10,95 juta lembar/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016). Selain itu, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa dari 141 responden toko modern dan pusat perbelanjaan tersebut, sebanyak 87% menyatakan setuju terhadap penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui pembatasan penggunaan kantong plastik.

Adapun Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.23

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Indeks LH Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	39	39,41	101,05%
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	85	91,16	107,25%
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	30	30,13	100,43%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
	Indek Kualitas LH		51,33	53,56	102,91%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2018, Indek Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari komponen



Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan dari target 51,33 tercapai 53,56 (102,91%). Pencapaian Sasaran didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup;

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 1,203,645,587,866.50 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 977,602,096,464.97 atau dengan serapan dana APBD mencapai 81,22%. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018, komposisi belanja APBD Kota Denpasar dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.24
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	1,162,346,186,245.21	1,055,158,034,146.06	90.78
2	Belanja Langsung	1,203,645,587,866.50	977,602,096,464.97	81.22
	Jumlah	2,365,991,774,111.71	2,032,760,130,611.03	90.78

Sumber : BPKAD Kota Denpasar, 2018



Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 51,90% dari realisasi belanja Kota Denpasar di tahun 2018 dan sisanya sebesar 48,09% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.203.645.587.866,50. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Denpasar tahun 2018 adalah sebesar Rp. 977.602.096.464,97 atau 81,22%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar
Per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	6,558,652,170	5,740,842,080	87.53
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	45,873,733,310	42,474,957,351	92.59
3	Mengentaskan Kemiskinan	14,838,008,934	12,382,863,470	83.45
4	Mengurangi pengangguran	9,560,049,910	8,706,524,480	91.07
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	360,425,672,452	252,266,862,126	69.99
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	12,239,232,000	10,396,598,880	84.94
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8,441,068,140	7,664,752,261	90.80
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	7,065,502,000	5,086,050,300	71.98
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	257,318,514,090	228,131,702,572	88.66
10	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	422,191,840,481	55,951,641,607	84.31



No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
11	Berkembangnya industri Pengolahan dan Perdagangan	5,717,928,135	5,193,782,984	90.83
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	724,972,705	655,755,555	90.45
13	Meningkatnya perkembangan Ekonomi Masyarakat kecil	1,812,887,900	1,750,930,835	96.58
14	Meningkatnya nilai investasi	127,485,000	125,985,000	98.82
15	Meningkatkan pariwisata berbaris budaya	10,126,132,990	8,546,519,169	84.40
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	40,623,907,650	32,526,327,795	80.07
	Jumlah	1,203,645,587,867	977,602,096,465	81.22

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
A	MISI 1				
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	105,31	5,740,842,080	87.53





No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	Belum Ada Nilai	42,474,957,351	92.59
B	MISI 2				
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	99,86	12,382,863,470	83.45
4	Mengurangi Pengangguran	1	101,58	8,706,524,480	91.07
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	100	252,266,862,126	69.99
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	100,01	10,396,598,880	84.94
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	103,28	7,664,752,261	90.80
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	133,52	5,086,050,300	71.98
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	99,99	228,131,702,572	88.66
C	MISI 3				
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	99,60	355,951,641,607	84.31
D	MISI 4				
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	101,53	5,193,782,984	90.83
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	97,14	655,755,555	90.45
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	100	1,750,930,835	96.58
14	Meningkatnya nilai investasi	1	92,30	125,985,000	98.82
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	104	8,546,519,169	84.40
E	MISI 5				



No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	102,91	32,526,327,795	80.07

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2018

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 16 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% yaitu sebanyak 10 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan



Tabel 3.27
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
A	1				
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	105,31	87,53	17,78
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	Belum Ada Nilai	92,59	Belum Ada Nilai
B	MISI 2				
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	99,86	83,45	16,41
4	Mengurangi Pengangguran	1	101,58	91,07	10,51
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	100	69,99	29,01
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	100,01	84,94	15,07
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	103,28	90,80	12,48
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	133,52	71,98	61,54
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	99,99	88,66	11,33
C	MISI 3				
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	99,60	84,31	15,29
D	MISI 4				
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	101,53	90,83	10,70
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	97,14	90,45	6,69
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	100	96,58	3,42
14	Meningkatnya nilai investasi	1	92,30	98,82	-6,52
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	104	84,40	19,60





No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
E	MISI 5				
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	100,62	80.07	20,55

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2018



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018. LAKIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 29 Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada tahun 2018, sebagai berikut :

- 13 indikator atau 44,83% kategori Baik Sekali dan melampaui target.
- 7 indikator atau 24,13% kategori Baik dan mencapai target,
- 8 Indikator atau 27,59% kategori Baik tetapi belum mencapai target.
- 1 indikator atau 3,45% data belum tersedia.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun kedua yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-



2021, dan khususnya untuk tahun 2018 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Perubahan Tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan diupayakan untuk dipenuhi dalam sisa waktu RPJMD sampai tahun 2021 dengan memprioritas program/kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja dari indikator yang belum tercapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.

Denpasar, 28 Maret 2019

WALIKOTA DENPASAR,



RAIDHARMAWIJAYA MANTRA





LAMPIRAN





WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/201M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar;
5. Tujuan adalah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
9. Keluaran *output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
11. Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

- a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar diberikan tugas untuk mengumpulkan, menyusun dan merumuskan hasil *review* akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Inspektorat Kota Denpasar melakukan *review* atas pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini serta melaporkan kepada Walikota Denpasar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2018



Plt. Walikota Denpasar

Agusti Ngurah Jaya Negara

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2018



Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, Msi

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018
TANGGAL 27 MARET 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicators* atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Denpasar beserta Perangkat Daerah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari indikator capaian kinerja utama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Pasal 3 antara lain disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, dan pasal 4 (3) disebutkan antara lain Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Kota Denpasar perlu diformalkan dalam bentuk Peraturan Walikota, dimana Indikator Kinerja Utama ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama, juga untuk menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran penyusunan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai tolok ukur kinerja utama baik itu di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Sekretariat DPRD Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar, Dinas Daerah Kota Denpasar, Badan Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, dan Rumah Sakita Daerah Kota Denpasar berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD). Penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 melalui kompilasi seluruh kegiatan strategis dari seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama ini memuat Aspek, Fokus, Indikator dan Penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah Kota Denpasar yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil *outcome* sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Kota Denpasar berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar 2017 Nomor 3);

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar mencakup indikator kinerja utama atas sasaran, program dan kegiatan utama Kota Denpasar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah (Bagian - bagian di lingkungan Sekretariat Daerah), Dinas Dinas, Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama memuat tolok ukur kinerja atas Aparatur, Program-Program Utama, Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada keluaran (output) maupun hasil (outcome) untuk indikator masing-masing Sekretariat (Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah), serta Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor), Dinas-Dinas yang meliputi Perangkat Daerah pada Tabel berikut.:

Tabel 1.1
Perangkat Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
1	Sekretariat Daerah Kota Denpasar : 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar 3. Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar 4. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar 5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar 6. Bagian Umum Setda Kota Denpasar 7. Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar 9. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar 10. Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar
3	Inspektorat Kota Denpasar
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
8	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
20	Dinas Sosial Kota Denpasar
21	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
23	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
28	Dinas Pertanian Kota Denpasar
29	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
30	Dinas Pariwisata Kota Denpasar
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
32	RSUD Wangaya
33	Camat Denpasar Barat
34	Camat Denpasar Timur
35	Camat Denpasar Selatan
36	Camat Denpasar Utara

D. SISTEMATIKA

Adapun Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kota Denpasar menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja yang baik. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama *Core Area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Beranjak dari kenyataan arah perkembangan masyarakat Kota Denpasar tumbuh menjadi masyarakat kreatif karena digerakkan oleh Visi **"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"** karena itu tidak berlebihan bila pada periode 2016-2021 Kota Denpasar dicanangkan menjadi Kota Kreatif. Untuk menguatkan pondasi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif pada tahun 2016-2021, dibutuhkan strategi kreatif dan inovatif, diantaranya aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistimatis, partisipatif dan berkelanjutan (*sustainable*).

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu penetapan indikator kinerja utama ditujukan untuk untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 3 (tiga) Aspek Utama dan 13 (Tiga Belas) Sasaran yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yaitu :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Ketahanan Pangan
3. Kesejahteraan Rakyat
4. Kebudayaan dan Pariwisata

B. Aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Pendidikan dan Olah Raga
2. Kesehatan
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban

C. Aspek Daya Saing Daerah yang terdiri dari 5 fokus utama yaitu:

1. Perekonomian
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
3. Lingkungan Hidup
4. Iklim Berinvestasi
5. Kreativitas dan Inovasi

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 13 fokus yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Ketola pemerintah yang Baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur.
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha.
8. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan Inovasi
11. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, disampaikan pada Lampiran II.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar merupakan media peningkatan kinerja Pemerintah dimana setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama tersebut akan terus diupayakan diantara masing-masing Perangkat Daerah, sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pencapaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja utama akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja dimasing-masing perangkat daerah pelaksana kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam perumusan dan penetapan indikator kinerja utama tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup perangkat daerah, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.



Plt. Walikota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TANGGAL 27 MARET 2018
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
1	Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	Areal lahan pertanian yang dapat dipertahankan akibat alih fungsi lahan
				2	Indeks Tri Hita Karana	Mengambarkan keberhasilan dalam membangun sikap hidup masyarakat yang seimbang antara memuja. Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia, serta mengembangkan kasih- sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Melihat kinerja dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untu memenuhi kebutuhan dasarnya
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)	Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata rata kesempatan hidup atau waktu hidup yang tersisa
		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki laki dan perempuan dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
				10	Katagori Kota Layak Anak	Menggambarkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%).	Menggambarkan upaya/penanganan untuk mengurangi kekumuhan kawasan permukiman.

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%).	Panjang jalan yang memenuhi kreteria kondisi jalan baik.
				13	Titik Genangan (%)	Untuk melihat keberhasilan dalam mengatasi titik genangan.
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	Mengambarkan keberhasilan dalam pemenuhan rumah tangga terhadap akses jaringan sanitasi.
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang terlindungi
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	Menggambarkan Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan.
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	Tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor Industri pengolahan dalam pembentukan PDRB.
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB.
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap penguatan lembaga adat dalam peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas usaha kecil
				23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas koperasi
		14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Menggambarkan perkembangan ekonomi daerah yang layak untuk investasi

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Menggambarkan perkembangan sekor pariwisata
				26	Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik	Menggambarkan tingkat kunjungan ke obyek daya tarik wisata
				27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	Menggambarkan jumlah uang yang dibelanjakan di daerah
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan	16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi (%)	Jumlah sampah yang dihasilkan dikurangi dengan jumlah sampah yang dibawa ke TPA

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3		4	5
	manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa			29 Indeks LH	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.



Plt. Walikota Denpasar

Gusti Ngurah Jaya Negara



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 9 Januari 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018
1		2		3	4
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.382
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	79,91
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2.10
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,40
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,27
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78,25
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	20,00
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	62,72
		13	Titik Genangan	Persen	20
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	44,86

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018
1		2		3	4
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,74
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,00
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,20
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,20
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	63
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2.5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	576,254
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3,13
			- Domestik	Hari	3,10
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Juta rupiah	290.446,85

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018
1		2		3	4
			Restoran, Pajak Hiburan		
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	24
		29	Indeks LH	Indeks	N/A

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : **Rp. 2.040.573.867.675,28** (Dua Triliun Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah koma Dua Puluh Delapan Sen.



WALIKOTA DENPASAR,

[Signature]

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
1.	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	Luas areal subak yang dapat dipertahankan (ha)	2.382	2.170	91,10%
		Indeks Tri Hita Karana (indeks)	79,91	95.50	119.51 %
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	2,10	2.24	99.86 %
4	Mengurangi Pengangguran	Angka Pengangguran	3,40%	1.82%	101.58%
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,27	74,27	100%
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	12,55	12,56	100.01%
7	Meningkanya pengarusutamaan gender dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (%)	78,25	96,88	118.63%
		Indeks Pemberdayaan Gender (%)	60	58,80	91.20%
		Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Luas Permukiman kumuh (ha)	21,65% 144,48 ha	55,17% 82,66 ha	133,52%
		Jalan kondisi baik (%)	62,72%	77,59	88,23
9	Meningkatnya kualitas insfrastruktur	Titik genangan (%)	20% Turun 1.6 titik	25% 6 titik	105%
		Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	44,86%	45,29%	100.43%
		Penduduk memanfaatkan air bersih terlindungi (%)	47,74%	54,05%	106,31%
		Indeks kepuasan masyarakat	81	80.016	98,79%
10	Meningkatnya tata kelola pemerinntahan yang efektif dan akuntabel	Opine BPK terhadap pengelolaan Keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		Predikat sistem akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	5	6	7
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Pertumbuhan sektor Industri pengolahan dalam PDRB (%)	3,2%	4,63%	101,43%
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	6,2%	7,83%	101,63%
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	Lembaga perkreditan desa sehat (%)	100% 35 LPD Sehat	34 LPD Sehat	97,14%
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi masyarakat Kecil	Usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil (%)	0,50%	0.50%	100%
		Koperasi yang SHU-nya meningkat (%)	63%	63%	100%
14	Meningkatnya nilai Investasi	Investasi yang tercatat di PTSP	2,5% Rp 5.047.349.841 .442,-	Rp 4.658.841.787.073, -	92,30%
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis Budaya	Jumlah Kunjungan Wisatawan (org)	576.254	594.539	103%
		Lama Tinggal Wisatawan -Asing	3,13 hari	3,13	100%
		-Domestik	3,10 hari	3,10	100%
		Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan (dlm jutaan rupiah)	290.446,85	327,251.39	113%
		Sampah tereduksi	24%	22,32%	98,32%
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks LH	51,33	53,56	102,91%

Denpasar, Maret 2019

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA KOTA DENPASAR
TAHUN 2018

No	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan
1	Penghargaan Nasional Role Mode Pelayanan Publik katagori “A” sebagai kategori sangat baik, di raih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar	Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI 2018
2	Penghargaan Nasional Role Mode Pelayanan Publik katagori “A” sebagai kategori sangat baik, di raih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar	Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. 2018
3	Penghargaan Nasional Role Mode Pelayanan Publik katagori “B” sebagai kategori baik, di raih RSUD Wangaya Kota Denpasa	Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI 2018
4	Penghargaan Bali Otonomi Award 2017 diraih Pemerintah Kota Denpasar atas Kesinambungan Politik lewat Inovasi Pro Denpasar dalam pelayanan publik katagori utama dengan predikat Terkreatif, Terunik dan Terinovasi	Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP) 2018
5	Penghargaan Public Services of The Year Provinsi Bali untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam ajang Indonesia Marketeers Festival 2018	Perusahaan Markplus.inc 2018
6	Penghargaan Seni bidang pendidikan seni dari Universitas Negeri Jakarta diraih Seniman Terbaik Kota Denpasar, yakni Nyoman Suarsa.	Universitas Negeri Jakarta 2018
7	Penghargaan Special Award From Japan Habitat Association tingkat Internasional diraih SMAN 3 Denpasar, dalam ajang Konfrensi Water Is Life di Tokyo Jepang.	Japan Habitat Association 2018
8	Penghargaan sebagai Juara 3 Bidang Teknik Enginering tingkat Internasional diraih Japan Habitat Association 2018 SMAN 3 Denpasar, dalam ajang Konfrensi Water Is Life di Tokyo Jepang.	Japan Habitat Association 2018

No	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan
9	Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya yang telah didapatkan berturut turut selama 8 kali sejak tahun 2011 dan pada tahun 2018 ini kembali diraih Denpasar, dalam Penganugrahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2018
10	Penghargaan Forum Anak Daerah terbaik tingkat Nasional, dalam Penganugrahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2018
11	Penghargaan Sekolah Ramah Anak tingkat Nasional diperoleh SMP Dwijendra Denpasar, dalam Penganugrahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2018
12	Penghargaan Puskesmas Ramah Anak tingkat Nasional yang diperoleh Puskesmas 1 Denpasar Selatan, dalam Penganugrahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2018
13	Penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik di Provinsi Bali 2018 atas performansi, inovasi dan komitmen membangun pariwisata daerah dalam ajang Penganugerahan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018	Kementerian Pariwisata RI. 2018
14	Penghargaan 10 Kota Terbaik Nasional 2018 diraih Pemerintah Kota Denpasar atas performansi, inovasi dan komitmen membangun pariwisata daerah dalam ajang Penganugerahan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018	Kementerian Pariwisata RI. 2018
15	Penghargaan Juara Guru Berprestasi Terbaik Pertama Tingkat Nasional dalam ajang Guru Berprestasi Pendidikan Dasar 2018 yang di peroleh Guru SDN 12 Dauh Puri Denpasar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2018
16	Penghargaan Dukcapil Hebat diraih Pemerintah Kota Denpasar sebagai Reward yang diberikan kepada kepala daerah Walikota Denpasar, IB. Rai Dahrmawijaya Mantra yang dinilai telah memberikan dukungan prima terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Denpasar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementrian Dalam Negeri RI 2018

No	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan
17	Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 6 kali berturut-turut diraih Pemerintah Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dikarenakan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang dinilai telah transparan dan akuntabel	Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. 2018
18	Penghargaan terbaik diraih Pemkot Denpasar dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Bali tahun 2018 dengan mengantongi nilai 850. Capaian ini bukan kali pertama, melainkan yang ketiga secara berturut-turut sejak tahun 2016 lalu	Komisi Informasi Provinsi Bali. 2018
19	Penghargaan nasional Pakarti Utama Dua melalui lomba IVA Test yang diwakili oleh Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan dimana dari Sembilan kabupaten/kota se-Bali PKK Kota Denpasar satu-satunya Duta Provinsi Bali yang meraih penghargaan.	Ketua Umum PKK Pusat Ny. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo 2018
20	Penghargaan Nasional Anugerah Pandu Negeri kategori terbaik tata kelola pemerintahan diraih Pemkot Denpasar karena Denpasar merupakan salah satu kota terbaik, serta memiliki pemimpin inovatif yang telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan IIPG (Indonesian Institute for Public Governance). 2018 pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola yang amanah.	
21	Penghargaan Nasional kepada Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar atas komitmen untuk mengimplementasikan MPP sebagai wujud nyata Gerakan Indonesia Melayani (GIM) menuju pelayanan publik kelas dunia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) di Lapangan ex KONI, Manado. 2018	
22	Penghargaan Nasional Kota Layak Pemuda 2018 Kategori Madya diraih Kota Denpasar	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. 2018

No	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan
	dalam ajang Anugerah Pemuda Pelopor Tahun 2018.	
23	Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat Nasional kategori wirausaha muda pemula berprestasi Tingkat Nasional, Bidang Pangan dan Kuliner di peroleh oleh salah satu Wirausaha Muda Kota Denpasar yakni Made Windu Segara Senet yang merupakan pemilik Mangsi Grill and Caffee	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI 2018
24	Penghargaan National Procurement Award (NPA) 2018 kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 diraih Pemerintah Kota Denpasar atas komitmen Pemkot Denpasar di dalam penerapan eProcurement di Kota Denpasar	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI 2018
25	Penghargaan anugerah National Procurement Award (NPA) 2018 kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 diraih Pemkot Denpasar karena memenuhi syarat standarisasi LPSE sesuai dengan ketentuan dari LKPP RI Kepala LKPP RI Agus Prabowo. 2018	
26	Penghargaan Nasional Tertinggi Natamukti diraih Pemkot Denpasar karena mampu meningkatkan daya saing UMKM baik nasional hingga internasional Secara berkelanjutan dan konsisten	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI 2018 menunjukan kinerja yang baik dalam peningkatan UMKM
27	Penghargaan Nasional Tertinggi Natamukti Nindya Ganapravara diraih Pemkot Denpasar karena mampu meningkatkan daya saing UMKM baik nasional hingga internasional Secara berkelanjutan dan konsisten menunjukan kinerja yang baik dalam peningkatan UMKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI 2018
28	Penghargaan Nasional pada bidang pelayanan publik diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, dengan kategori nilai A yakni Sangat Baik	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. 2018
29	Penghargaan Nasional pada bidang pelayanan publik diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, dengan kategori nilai B yakni	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI 2018

No	Nama Penghargaan	Instansi Yang Memberikan
	Baik	
30	Penghargaan Nasional pada bidang pelayanan publik diraih RSUD Wangaya Kota Denpasar, dengan kategori nilai B yakni Baik RI. 2018	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
31	Penghargaan Innovation Network of Asia (INA) diraih Walikota Rai Mantra sebagai Walikota Entrepreneur Award 2018 kategori Pariwisata dalam ajang INA APEKSI AWARD 2018 Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK CAM) dan MarkPlus Inc. 2018	
32	Penghargaan Nasional Moveable Children's Playground (MCP) diraih Pemkot Denpasar karena Komitmen Penuhi Fasilitas Ruang Bermain dan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. 2018
33	Penghargaan Nasional Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tertinggi katagori "Utama" diraih Pemkot Denpasar karena komitmen Pemkot Denpasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama mewujudkan pengarus utamaan gender (PUG)	Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. 2018
34	Penghargaan Kesetiakawanan Sosial Nasional diraih Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra karena Ny. Selly memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar .	Kementerian Sosial (Kemensos) RI.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Telp. (0361) 234876 Fax. (0361) 227160 Denpasar

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar.

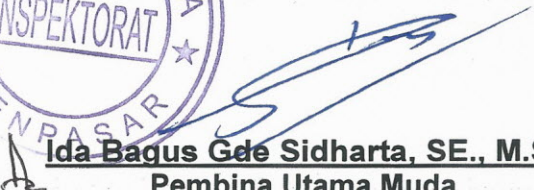
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Denpasar, 26 Maret 2019

Inspektur Kota Denpasar




Ida Bagus Gde Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
19640223 199203 1 009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Maruti No 8 Denpasar 80115
Tel. (0361) 413357 | Fax. (0361) 421822
Email : bappeda@denpasarkota.go.id
www.denpasar.go.id

